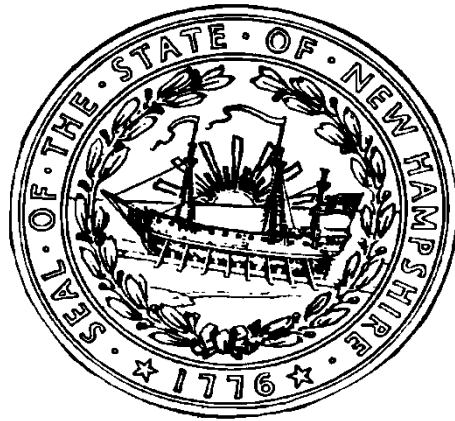


Buku Panduan Prosedur perlindungan Pendidikan Khusus New Hampshire



Buku Panduan ini didasarkan pada *Undang-Undang Pendidikan Penyandang Disabilitas tahun 2004* dan *Peraturan NH tentang Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas berlaku sejak 24 Maret 2017*

April 2018

*Dikembangkan oleh
Departemen Pendidikan NH, Biro Pendidikan Khusus
bekerja sama dengan Pusat Informasi Orang Tua, Asosiasi Administrasi
Pendidikan Khusus NH, dan Asosiasi Administrasi Sekolah NH*

Didistribusikan oleh: (Tulis Nama dan Alamat BPD Di Sini)

Pendahuluan

Anak-anak cenderung sukses jika orang tua dan pendidik bekerja sama untuk mengembangkan dan mencapai tujuan pendidikan untuk anak penyandang disabilitas. Hukum Federal dan Nasional memberikan banyak kesempatan bagi orang tua untuk terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebutuhan pendidikan khusus untuk anak-anak.

Buku panduan ini untuk memberikan informasi kepada orang tua, siswa penyandang disabilitas yang sudah dewasa, pendidik, dan lainnya tentang hak orang tua/anak dalam proses pendidikan khusus. Hak-hak ini disebut "prosedur perlindungan". Orang tua adalah bagian dari Tim PPP. Tim PPP adalah kelompok yang membuat sebagian besar keputusan penting mengenai kebutuhan dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak. Orang tua adalah anggota penuh dari Tim PPP.

Tim PPP menentukan evaluasi, kelayakan, Program Pendidikan Perorangan atau dikenal dengan Individualized Education Program (IEP), dan penempatan pendidikan anak. Nama resmi Tim ini adalah Tim PPP, tapi dapat disebut dengan nama lain tergantung fungsi atau aktivitas yang sedang ditangani. Anda adalah anggota penting dari Tim PPP; suara Anda harus dilibatkan. Proses pendidikan khusus menawarkan kesempatan bagi orang tua untuk berbagi ilmu dan pengetahuan tentang anak mereka dengan orang tua lain dalam Tim anak mereka. Hukum dibuat untuk menawarkan kesempatan bagi orang tua untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan khusus dan mendorong komunikasi antara sekolah dan orang tua atas nama anak mereka. Proses pendidikan khusus dianggap paling efektif ketika orang tua dan petugas sekolah saling memahami dan dapat bekerja sama.

Orang tua dan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan khusus harus memahami hak-hak mereka dan menyadari undang-undang batasan dan larangan lain agar dapat mengakses pendidikan publik yang gratis dan sesuai atau Free Appropriate Education at Public Expense (FAPE) secara penuh.

Individuals with Disabilities Education Act (IDEA 2004) mewajibkan distrik sekolah untuk memberikan salinan prosedur prosedur perlindungan (hak orang tua) kepada orang tua cukup sekali dalam satu tahun sekolah. Ada waktu lain yang mengharuskan salinan diberikan kepada Anda: (1) saat rujukan awal atau permohonan evaluasi dari orang tua; (2) saat menerima keluhan Nasional pertama atau keluhan due process pertama dalam satu tahun sekolah; (3) saat mengambil keputusan untuk melaksanakan tindakan disipliner yang dapat mengubah penempatan; dan (4) saat orang tua meminta.

Pastikan bahwa walaupun buku panduan ini sudah memenuhi syarat menurut *Undang-Undang Pendidikan Penyandang Disabilitas tahun 2004* (IDEA 2004) bahwa orang tua harus diberi dokumen tertulis yang menjelaskan prosedur prosedur perlindungan sesuai haknya, buku panduan ini tidak mencakup seluruh pasal undang-undang Federal atau Nasional mengenai pendidikan khusus.

Buku panduan Prosedur Prosedur perlindungan dapat ditemukan di laman web Departemen Pendidikan NH:

https://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/proceduralsafeguards.htm

Teks lengkap Peraturan NH tentang Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas dapat ditemukan di laman web Departemen Pendidikan NH:

http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/documents/newly_adopted_nh_rules.pdf

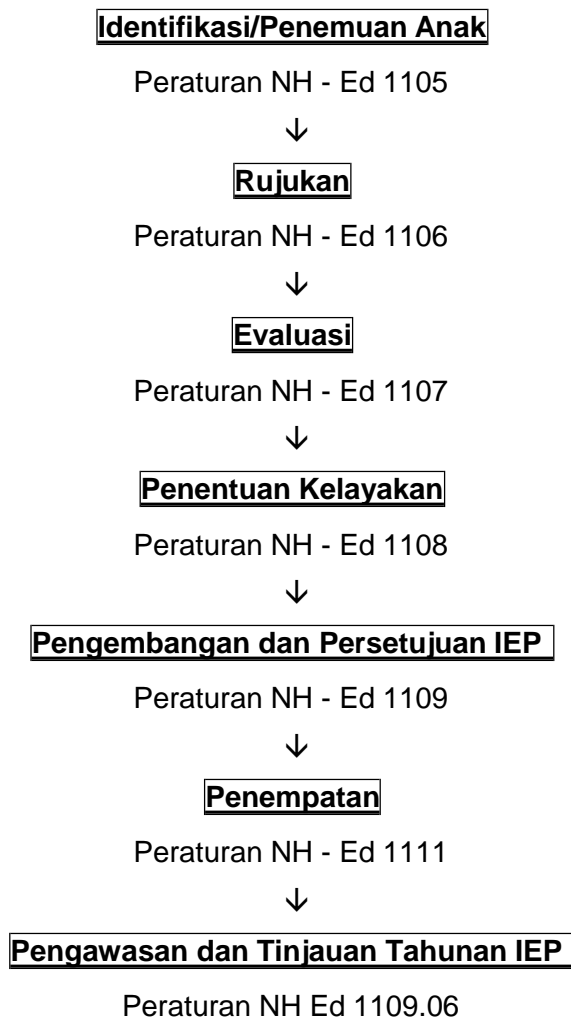
Untuk salinan gratis Peraturan N.H. tentang Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas (Peraturan NH), hubungi Departemen Pendidikan di (603) 271-3741.

Daftar Isi	Halaman
Gambaran Umum Proses Pendidikan Khusus NH	1 - 3
Persetujuan Orang tua	3 - 6
Pemberitahuan Tertulis Sebelumnya	6
Evaluasi Pendidikan Independen	7
Wali Orang Tua Pendidikan	8
Kerahasiaan Informasi	8 - 10
Prosedur Keluhan Nasional	11 - 12
Penyelesaian Perselisihan Alternatif	12 - 14
Prosedur Keluhan Due Process	14 - 18
Sidang Due Process yang tidak Memihak	18 - 21
Urusan Pasca Sidang dan Biaya Pengacara	21 - 22
Prosedur dalam Menghukum Anak Penyandang Disabilitas	22 - 24
Undang-undang Pembatasan	25
Syarat Penempatan Anak di Sekolah Swasta secara Gratis yang Sepihak	25 - 26
Bantuan/Narasumber Gratis atau Murah	27
Definisi dan Jenis-Jenis “Hari”	28 - 29
Singkatan	30 - 31
Lampiran A: Pemberitahuan Tertulis Tentang Penggunaan Dana Sosial atau Asuransi Umum	32 - 34

Gambaran Umum Proses Pendidikan Khusus NH

Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran singkat tentang proses pendidikan khusus sebagai referensi ketika membaca Prosedur Prosedur perlindungan New Hampshire. Terdapat narasumber tambahan untuk membantu Anda mengembangkan pemahaman yang komprehensif mengenai pendidikan khusus.

Proses pendidikan khusus ini meliputi langkah-langkah spesifik beserta persyaratannya masing-masing. Setiap langkah dalam proses pendidikan khusus meliputi prosedur untuk Anda dan distrik sekolah agar dapat bekerja sama. Rentetan proses pendidikan khusus meliputi:



Catatan: Beberapa rapat wajib ini dapat digabung.

Proses pendidikan khusus meliputi tinjauan tahunan PPP dan penempatan, yang didasarkan pada informasi seperti evaluasi formal dan informal, observasi dan kemajuan sasaran dan tujuan PPP saat ini.

Identifikasi/Penemuan Anak Siapa pun boleh mengajukan seorang anak apabila diduga memiliki disabilitas dan membutuhkan pendidikan khusus. Selain itu, semua distrik sekolah yang menerapkan proses pendidikan khusus harus menemukan, menentukan, dan mengevaluasi semua anak terduga penyandang disabilitas yang berusia antara 2,5 sampai 21 tahun untuk memastikan bahwa mereka layak diberi layanan yang diperlukan.

Rujukan dan Penempatan Rujukan Apabila Anda, seorang guru, atau orang lain menduga seorang anak menyandang disabilitas dan membutuhkan pendidikan khusus, Anda dapat membuat rujukan ke distrik sekolah. Apabila rujukan dibuat oleh orang selain, termasuk dari guru anak tersebut, Anda akan segera menerima pemberitahuan secara tertulis bahwa rujukan telah dibuat. Rapat penempatan rujukan, di mana Anda akan diundang, harus dilaksanakan dalam 15 hari kerja sejak menerima rujukan. Rapat ini (seperti semua rapat Tim PPP) harus dilaksanakan pada tanggal, waktu, dan tempat yang disepakati oleh Anda dan sekolah. Tim PPP mungkin memutuskan bahwa anak Anda tidak tampak memiliki disabilitas sehingga tidak membutuhkan pendidikan khusus dan layanan terkait, serta saat ini sekolah dapat memenuhi kebutuhan anak Anda melalui layanan pendidikan biasa. Sebaliknya, mereka mungkin memutuskan bahwa terdapat alasan atas dugaan jika anak tersebut memiliki disabilitas dan harus dievaluasi.

Sekolah harus memberi tahu Anda secara tertulis mengenai keputusan Tim PPP. Pemberitahuan ini adalah "Pemberitahuan Awal Tertulis" yang dijelaskan di halaman 6 dalam buklet ini. Apabila Tim PPP memutuskan bahwa diperlukan evaluasi tambahan, maka pemberitahuan awal tertulis juga akan disertai permohonan persetujuan orang tua untuk melakukan evaluasi perorangan yang untuk memutuskan apakah anak Anda menyandang disabilitas.

Evaluasi Jika anak Anda dipertimbangkan untuk memperoleh pendidikan khusus, izin tertulis dari Anda diperlukan sebelum evaluasi dilakukan. Distrik sekolah Anda akan menyusun evaluasi, secara gratis, yang akan dilakukan oleh penguji terlatih dan berpengalaman, bersertifikat atau berlisensi. Setelah distrik sekolah menerima izin tertulis dari Anda, evaluasi awal harus diselesaikan dalam waktu 60 hari. Untuk evaluasi ulang, proses evaluasi harus diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak izin orang tua diberikan atau dengan kesepakatan perpanjangan waktu yang tidak boleh lebih dari 30 hari.

BPD harus memberikan salinan masing-masing evaluasi penguji dan laporan penilaian kepada orang tua selambat-lambatnya 5 hari sebelum rapat tim PPP yang akan membahas laporan penilaian dan evaluasi tersebut. BPD harus memberikan laporan kepada orang tua dengan mengirimkannya melalui pos Amerika Serikat kecuali apabila orang tua dan BPD menyetujui metode lain. Jika Anda tidak setuju dengan evaluasi yang dilakukan oleh distrik sekolah, Anda dapat meminta distrik sekolah untuk menyediakan evaluasi pendidikan independen secara gratis.

Setelah evaluasi selesai, Anda akan menerima ringkasan tertulis.

Penentuan Kelayakan dan Kategori Disabilitas Jika evaluasi sudah selesai, Tim PPP akan menggunakan informasi tersebut untuk menetapkan apakah anak Anda layak diberi pendidikan khusus. Agar layak, anak Anda harus menyandang disabilitas dan membutuhkan pendidikan khusus dan layanan terkait yang diperoleh dari pendidikan. Anak Anda kemudian akan ditentukan dalam satu atau lebih jenis disabilitas spesifik seperti dijelaskan dalam Peraturan NH Ed 1102.01(t). Tim PPP harus mengadakan rapat sedikitnya tiga tahun sekali untuk menentukan kelayakan pendidikan khusus.

Perkembangan IEP Dalam waktu 30 hari sejak anak Anda dinyatakan layak diberi pendidikan khusus, Tim PPP akan mengadakan rapat untuk mengembangkan Program Pendidikan Perorangan (PPP) untuk anak Anda. PPP awal tidak akan berlaku hingga Anda setuju dan menandatangani. Tim PPP mencantumkan unsur wajib khusus yang terdaftar dalam Peraturan NH 1109.01 dan 1109.03.

Setelah anak Anda memiliki PPP, PPP ia akan dikaji ulang/direvisi dalam rapat Tim PPP sedikitnya setiap tahun. Anak Anda harus memberikan persetujuan sebelum PPP berlaku di setiap awal tahun sekolah. Pemberitahuan tertulis rapat Tim PPP akan Anda terima selambat-lambatnya 10 hari sebelum rapat diadakan. Pemberitahuan tersebut harus mencakup waktu dan tempat rapat, tujuan, dan daftar peserta yang akan hadir. Atas persetujuan orang tua atau agensi, pihak lain yang memiliki pengetahuan atau keahlian khusus yang berhubungan dengan anak tersebut, termasuk petugas layanan terkait, anak penyandang disabilitas juga dapat diundang, jika memungkinkan. Meskipun tidak wajib, orang tua diharapkan memberitahu sekolah sebelumnya apabila mereka mengundang tamu lain ke dalam rapat.

Penentuan Penempatan Pendidikan Setelah PPP dikembangkan, Tim PPP mengadakan rapat untuk menentukan penempatan di lingkungan dengan sedikit batasan (Least Restrictive Environment) di mana anak Anda dapat menerima pendidikan khusus dan layanan terkait seperti dijelaskan dalam PPPnya.

Penerapan dan Pengawasan Orang tua, pendidik, dan pihak lain yang terlibat akan mengawasi kemajuan secara langsung untuk memastikan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi. Jika terdapat kekhawatiran tentang kemajuan anak Anda, Anda dapat segera meminta dan menjadwalkan rapat Tim PPP.

Persetujuan Orang tua

Peraturan New Hampshire tentang Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas ~ Ed 1120.04

Distrik sekolah harus meminta izin secara tertulis kepada orang tua untuk pendidikan khusus dan layanan terkait yang akan diberikan kepada anak penyandang disabilitas, serta aktivitas lain yang menjadi bagian dari proses pendidikan khusus, kecuali dalam keadaan tertentu.

Mengizinkan berarti:

- (a) Anda telah sepenuhnya diberi tahu tentang seluruh informasi terkait aktivitas yang memerlukan izin dalam bahasa ibu atau cara komunikasi lainnya;
- (b) Anda paham dan setuju, secara tertulis, atas pelaksanaan aktivitas yang memerlukan izin, dan bahwa izin tersebut menjelaskan aktivitas dan mendaftarkan arsip (jika ada) yang akan dirilis dan kepada siapa; dan
- (c) (1) Anda paham bahwa pemberian izin ini bersifat sukarela dan Anda dapat mencabut izin ini kapan saja;
(2) Pencabutan izin tidak akan membatalkan tindakan yang sudah terjadi setelah Anda memberikan izin dan sebelum Anda mencabutnya.

Anda memiliki waktu 14 hari sejak tanggal permohonan distrik sekolah untuk menjawabnya secara tertulis. Batas waktu 14 hari dapat diperpanjang jika Anda dan distrik sekolah sama-sama menyepakati perpanjangan.

Persetujuan orang tua harus tertulis dan perlu “dinyatakan” bahwa, Anda telah memahami apa yang sedang diusulkan, apa konsekuensi (pro dan kontra) tindakan yang sedang diusulkan oleh sekolah, dan mengapa Tim PPP mengusulkan perubahan yang memerlukan persetujuan Anda.

Distrik sekolah harus menerima izin tertulis yang telah dinyatakan sebelum:

- Melakukan evaluasi awal;
- Menyediakan awal pendidikan khusus dan layanan terkait bagi anak penyandang disabilitas;
- Pembaruan PPP tahunan dan penempatan anak penyandang disabilitas;
- Menentukan atau mengganti klasifikasi disabilitas;
- Mengubah sifat atau tingkatan pendidikan khusus dan layanan terkait;
- Melakukan evaluasi ulang;
- Mengakses asuransi publik sesuai dengan 34 PPF 300.154(d); dan
- Setiap mengajukan akses asuransi pribadi.

Izin juga diperlukan untuk:

- Perpanjangan waktu evaluasi ulang. Setelah diizinkan secara tertulis oleh semua pihak, diperlukan batas waktu 60 hari yang menurut Ed 1107.01(d) dapat diperpanjang hingga beberapa hari tertentu, tapi tidak lebih dari 30 hari.
- Izin anggota Tim PPP sesuai dengan ketentuan (Ed 1103.01(e)).

Catatan: Izin untuk evaluasi awal bukan berarti izin untuk penyediaan awal pendidikan khusus dan layanan terkait.

Distrik sekolah tidak memerlukan izin Anda sebelum:

- Mengkaji data yang ada sebagai bagian dari evaluasi atau evaluasi ulang anak Anda; atau
- Melakukan tes atau evaluasi lain yang diberikan kepada semua anak, kecuali diperlukan izin dari semua orang tua anak.

Keadaan tertentu: Apabila distrik sekolah tidak menerima izin tertulis dari Anda dalam waktu 14 hari dan distrik sekolah dapat menunjukkan bahwa mereka telah melakukan upaya yang masuk akal untuk memperoleh izin Anda, distrik sekolah dapat menerapkan hal-hal berikut ini:

- Pembaruan PPP tahunan dan penempatan anak penyandang disabilitas;
- Penentuan atau penggantian klasifikasi disabilitas;
- Pengubahan sifat atau tingkatan pendidikan khusus dan layanan terkait;
- Pelaksanaan evaluasi ulang.

“Upaya yang masuk akal” meliputi rincian data panggilan telepon yang dilakukan dan hasil panggilan tersebut, salinan surat yang dikirim kepada Anda (melalui surat bersertifikat, diperlukan nota pengembalian) dan semua jawaban yang diterima, dan/atau rincian data kunjungan ke rumah Anda atau tempat kerja dan hasil kunjungan tersebut.

Bagi anak-anak yang berada di bawah pengawasan DARK, dan hak orangtuanya telah dihapus, negara dapat menunjuk wali orang tua pendidikan.

Ketika mempertimbangkan izin, Anda harus mengajukan pertanyaan tentang segala aktivitas yang memerlukan izin Anda.

Anda harus **menyerahkan** formulir izin ke **distrik sekolah dalam waktu 14 hari atau kurun waktu yang sudah disepakati**. Waktu dimulai sejak tanggal **pengiriman** formulir izin dari distrik sekolah kepada Anda. Perlu diperhatikan bahwa apabila formulir izin dikirim melalui pos, beberapa hari dari kurun waktu 14 hari sudah terlewati ketika Anda menerima permohonan izin tersebut. **Anda bertanggung jawab untuk memberikan jawaban.**

Ada empat cara untuk menjawab permohonan izin Anda dari sekolah. Hasil setiap jawaban yang dapat Anda pilih adalah:

1. Jika Anda mengizinkan, perubahan yang diajukan akan diterapkan.
2. Jika Anda tidak memberik izin, distrik sekolah tidak dapat menerapkan perubahan yang diajukan. Distrik sekolah memiliki beberapa pilihan sebagai upaya mendapatkan izin dari Anda:
 - a. Distrik sekolah mungkin akan mengadakan rapat Tim PPP tambahan untuk mendiskusikan kekhawatiran Anda;
 - b. Distrik sekolah mungkin akan meminta Anda untuk berpartisipasi secara sukarela dalam proses Penyelesaian Perselisihan Alternatif, seperti mediasi atau konferensi netral demi mencapai kesepakatan.

- c. Distrik sekolah diperlukan untuk usulan spesifik guna meminta sidang.
 - i. Distrik sekolah mungkin tidak akan menggunakan prosedur izin darurat jika Anda menolak menyetujui atau tidak menjawab:
 - permohonan izin untuk memberikan pendidikan khusus dan layanan terkait untuk pertama kalinya;
 - jika Anda sudah mendaftarkan anak Anda ke sekolah swasta dengan biaya pribadi;
 - jika anak Anda menjalani home schooling (pendidikan di rumah) sesuai dengan RST 193-A. Siswa penyandang disabilitas yang menjalani home schooling, bagaimanapun juga, tidak berhak menerima pendidikan publik yang gratis dan sesuai yang disediakan oleh distrik sekolah bagi siswa sekolah umum.

Catatan: Jika Anda menolak menyetujui anak Anda untuk menerima pendidikan khusus dan layanan terkait untuk pertama kalinya, distrik sekolah tidak perlu memberikan layanan tersebut dan hal ini tidak melanggar persyaratan untuk memberikan pendidikan publik yang gratis dan sesuai (PPGS) kepada anak Anda dan tidak perlu mengadakan rapat PPP atau mengembangkan PPP bagi anak Anda untuk layanan tersebut.

3. Orang tua anak penyandang disabilitas memiliki waktu 14 hari sejak dikirimkannya pemberitahuan tertulis sebelumnya berdasarkan Ed 1120.03 untuk menandatangani dokumen yang disertai pemberitahuan sebagai tanda mengizinkan, tidak mengizinkan, atau mengizinkan sebagian.
 - a. Setelah menerima izin sebagian dari orang tua, BPD:
 - i. Dapat menjadwalkan waktu dan tanggal yang disepakati untuk rapat tim PPP;
 - ii. Harus, jika diminta oleh orang tua, berdasarkan Ed 1109.06(b), bertemu dengan Tim PPP untuk mendiskusikan perubahan yang diusulkan dan/atau tambahan dalam PPP, kecuali sebagaimana ditetapkan sebelumnya dalam (3) berikut ini; dan
 - iii. Dapat menolak pengadaaan rapat tim PPP jika sudah ditetapkan bahwa perubahan yang diusulkan dan/atau tambahan ke dalam PPP telah disampaikan pada rapat tim PPP sebelumnya. Dalam hal ini, BPD harus menerbitkan Pemberitahuan Tertulis Sebelumnya sesuai dengan Ed 1109.06(b)(3), yang menjelaskan alasan BPD menolak pengadaaan rapat tersebut.
 - b. Apabila orang tua menolak mengizinkan satu atau lebih layanan atau aktivitas yang diusulkan, dan/atau meminta perubahan terhadap layanan atau aktivitas pada usulan awal, orang tua harus menjelaskan secara tertulis tentang hal-hal yang ditolak atau diminta.
4. Jika Anda tidak menjawab dalam waktu 14 hari atau perpanjangan waktu yang disepakati bersama dan distrik sekolah dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan upaya yang cukup untuk memperoleh izin dari Anda, mereka dapat melanjutkan hal-hal berikut:
 - a. Melakukan evaluasi awal; Sekolah dapat melakukan evaluasi melalui alternatif penyelesaian perselisihan (halaman 13-14 dan 18-21), atau mengajukan sidang due process.
 - b. Kajian ulang tahunan PPP dan penempatan anak penyandang disabilitas, meliputi:
 - i. Menentukan atau mengubah klasifikasi disabilitas;

- ii. Mengubah sifat atau tingkatan pendidikan khusus atau pendidikan khusus dan layanan terkait; dan
- iii. Melakukan evaluasi ulang.
 - Distrik sekolah harus menerapkan usulannya.
- iv. Setiap kali badan publik mengajukan akses asuransi pribadi.
 - Distrik sekolah dapat menghentikan tindakan yang lebih jauh.
- c. Menolak berarti tidak memberikan izin pada seluruh atau sebagian usulan distrik sekolah dan berbeda dengan mencabut izin untuk seluruh pendidikan khusus.

5. Pencabutan Apabila orang tua mencabut izin untuk seluruh pendidikan khusus secara tertulis, distrik sekolah:

- a. Harus memberikan Pemberitahuan Awal Tertulis bahwa distrik sekolah tidak akan melanjutkan seluruh layanan pendidikan khusus.
- b. Harus menghentikan seluruh layanan **pendidikan khusus**.
- c. Dilarang menggunakan mediasi atau due process untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Tidak menganggapnya sebagai pelanggaran persyaratan untuk menyediakan FAPE.
- e. Tidak diwajibkan untuk mengadakan rapat tim PPP. **Jika Anda mencabut izin secara tertulis, distrik dilarang memberikan seluruh layanan pendidikan khusus.**
- f. Baca Lampiran A sehubungan dengan pencabutan izin untuk akses asuransi publik.

Pemberitahuan Awal Tertulis

Peraturan New Hampshire tentang Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas ~ Ed 1120.03

“Pemberitahuan Awal Tertulis(PAS)” harus diberikan kepada Anda secara tertulis setelah memutuskan untuk merekomendasikan perubahan, tapi sebelum benar-benar membuat perubahan. Informasi di dalam PAS adalah penjelasan penting atas apa dan mengapa Tim PPP merekomendasikan adanya perubahan. Jika Anda meminta perubahan di dalam program anak Anda dan Tim PPP memutuskan untuk menolak melakukan perubahan, maka PAS harus diberikan kepada Anda untuk menjelaskan alasan penolakan tersebut.

Distrik sekolah harus memberikan PAS kepada Anda ketika distrik sekolah:

- mengusulkan untuk memulai atau mengganti kelayakan/identitas, evaluasi, atau penempatan pendidikan anak Anda, atau ketetapan pendidikan khusus dan layanan terkait (Pendidikan Publik yang Gratis dan Layak (FAPE)) untuk anak Anda; **atau**
- menolak untuk memulai atau mengubah kelayakan/identitas, evaluasi, atau penempatan pendidikan, atau ketetapan FAPE untuk anak Anda.

PAS menjelaskan perubahan apa yang diusulkan oleh Tim PPP dan mengapa Tim PPP mengusulkan perubahan ini. Anda harus diberi tahu secara tertulis, selambat-lambatnya 14 hari sebelum Tim PPP mengusulkan untuk menerapkan perubahan yang diusulkan.

Pemberitahuan Awal Tertulis (PAS) harus:

- mendeskripsikan tindakan yang diajukan atau yang ditolak pelaksanaannya oleh distrik sekolah;
- menjelaskan mengapa distrik sekolah Anda mengajukan atau menolak pelaksanaan tindakan tersebut;
- mendeskripsikan masing-masing prosedur evaluasi, penilaian, data, atau laporan yang digunakan distrik sekolah Anda dalam memberikan keputusan untuk mengajukan atau menolak tindakan tersebut;
- menyertakan pernyataan bahwa Anda memiliki perlindungan di bawah ketetapan prosedur perlindungan dalam IDEA 2004;
- menjelaskan bagaimana Anda dapat memperoleh deskripsi prosedur perlindungan apabila tindakan yang diusulkan atau ditolak oleh distrik sekolah bukan merupakan rujukan awal untuk evaluasi;
- menyertakan narasumber yang dapat Anda hubungi untuk membantu memahami IDEA 2004;

- menjelaskan pilihan lain yang dipertimbangkan oleh Tim program pendidikan perorangan (PPP) anak Anda dan alasan mengapa pilihan tersebut ditolak; serta
- memberikan deskripsi alasan lain mengapa lingkungan sekolah mengusulkan atau menolak tindakan tersebut.

PAS harus ditulis dalam bahasa yang dapat dipahami masyarakat umum; yaitu mudah dibaca dan dimengerti. PAS harus diberikan dalam bahasa ibu atau cara komunikasi yang lain (seperti bahasa isyarat) yang digunakan oleh orang tua (kecuali jika memang tidak memungkinkan).

Apabila bahasa ibu atau cara komunikasi orang tua bukan merupakan bahasa tertulis, distrik sekolah harus memastikan bahwa pemberitahuan tersebut diterjemahkan secara lisan atau dengan alat komunikasi lain, sehingga orang tua memahami isi pemberitahuan, serta terdapat bukti tertulis berupa terjemahan dan pemahaman orang tua terhadap isinya.

Evaluasi Pendidikan Independen

Peraturan New Hampshire tentang Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas ~ Ed 1107.03, 1120.07

Sebagai orang tua anak penyandang disabilitas (atau anak yang telah dinilai butuh pendidikan khusus), Anda berhak mendapatkan evaluasi pendidikan independen untuk anak Anda.

Evaluasi pendidikan independen adalah evaluasi yang dilakukan oleh petugas yang tidak bekerja di distrik sekolah dan memenuhi syarat untuk melakukan evaluasi.

Distrik sekolah dapat menyediakan evaluasi pendidikan independen dengan biaya umum jika Anda tidak menyetujui evaluasi yang dilakukan oleh distrik sekolah. (Istilah resmi “dengan biaya umum” berarti bahwa distrik sekolah mungkin membayar penuh seluruh biaya evaluasi atau memastikan bahwa evaluasi tersebut diberikan tanpa memungut biaya dari orang tua.) Anda hanya berhak atas satu evaluasi pendidikan independen secara gratis apabila distrik sekolah melakukan evaluasi yang tidak Anda setujui. Jika Anda meminta evaluasi pendidikan independen, distrik sekolah mungkin akan menanyakan alasan Anda menolak evaluasi distrik sekolah. Tapi, Anda tidak diwajibkan untuk menjelaskannya dan hal ini tidak akan memperlambat keputusan sekolah untuk membiayai evaluasi independen tersebut atau tidak.

Jika Anda meminta evaluasi pendidikan independen dengan biaya publik, distrik sekolah harus segera:

- setuju menyediakan evaluasi pendidikan independen secara gratis; atau
- memulai sidang due process untuk menunjukkan bahwa evaluasi distrik sekolah sudah layak. Jika Anda meminta evaluasi pendidikan independen, distrik sekolah harus memberitahu Anda tentang:
- tempat untuk mendapatkan evaluasi pendidikan independen; dan
- kriteria distrik sekolah yang berlaku untuk evaluasi pendidikan independen, meliputi
 - a. lokasi evaluasi; dan
 - b. kualifikasi penguji (orang yang melakukan evaluasi).

Kriteria ini harus sama dengan kriteria yang digunakan distrik sekolah ketika melakukan evaluasi. Distrik sekolah mungkin tidak memiliki batasan, syarat atau kronologi lain terkait orang tua yang memperoleh evaluasi pendidikan independen selain lokasi dan kualifikasi penguji. Batasan ini tidak boleh terlalu ketat sehingga orang tua tidak memiliki pilihan penguji independen.

Anda selalu memiliki hak untuk memperoleh evaluasi pendidikan independen dengan biaya pribadi. Anda juga berhak untuk membawa evaluasi yang dibiayai orang tua kepada Tim PPP untuk digunakan dalam menentukan kebutuhan pendidikan anak Anda. Anda tidak diwajibkan untuk berbagi evaluasi yang dibiayai orang tua dengan Tim PPP. Tapi, distrik sekolah dapat berupaya mendapatkan hasil evaluasi yang dibiayai orang tua melalui proses pencarian sebagai bagian dari proses sidang due. Siapa pun yang membiayai evaluasi, Tim PPP harus mempertimbangkan hasil evaluasi pendidikan independen mana pun, apakah evaluasi tersebut memenuhi kriteria distrik sekolah (sebagaimana dijelaskan sebelumnya) dalam keputusan tentang pengadaan pendidikan publik yang gratis dan sesuai bagi anak Anda. Selain itu, hasil evaluasi pendidikan independen mana pun dapat digunakan sebagai bukti dalam sidang due process yang tidak memihak.

Jika Petugas Pengadilan meminta evaluasi pendidikan independen sebagai bagian dari proses sidang, distrik sekolah harus membiayai evaluasi tersebut.

Jika Petugas Pengadilan memutuskan bahwa evaluasi distrik sekolah sudah layak, lingkungan sekolah tidak diwajibkan membiayai evaluasi pendidikan independen tersebut atau mengganti uang Anda.

Pengganti Wali dalam Pendidikan

Peraturan New Hampshire tentang Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas ~ Ed 1115

Apabila seorang anak penyandang disabilitas membutuhkan pendidikan khusus dan orang tua atau walinya tidak diketahui atau tidak ditemukan setelah upaya pencarian yang cukup, atau jika anak tersebut berada di bawah hak asuh divisi anak, remaja dan keluarga, komisaris atau petugas yang dipercaya boleh menunjuk pengganti wali yang akan mewakili orang tua anak tersebut dalam proses pengambilan keputusan pendidikan.

Kerahasiaan Informasi

Peraturan New Hampshire tentang Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas ~ Ed 1119.01

Distrik sekolah memiliki berbagai jenis data pendidikan tentang anak-anak yang berada di bawah tanggung jawabnya. **Data pendidikan** adalah jenis data yang tercakup dalam definisi “data pendidikan” dalam 34 PPF Bab 99 (peraturan yang menerapkan Undang-Undang Privasi dan Hak Pendidikan Keluarga tahun 1974, 20 U.S.C. 1232g (UUHPKK)). Data tersebut dapat meliputi kartu rapor, laporan kemajuan, catatan kehadiran dan data kesehatan, kaset video, laporan sanksi, dan salinan dokumen elektronik.

Data pendidikan yang berisi informasi “**Pengenal pribadi**” harus dilindungi. Pengenal pribadi adalah informasi yang berisi:

- nama anak Anda, nama Anda sebagai orang tua, atau nama anggota keluarga lainnya;
- alamat anak Anda;
- data diri, misalnya nomor jaminan sosial atau nomor induk sekolah anak Anda; atau
- daftar ciri-ciri pribadi atau informasi lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak Anda secara pasti.

Pemberitahuan untuk Orang tua Departemen Pendidikan NH atau negara lain mungkin akan memperoleh, menyimpan, atau menggunakan beberapa data sekolah. Lembaga-lembaga ini harus memenuhi persyaratan untuk melindungi kerahasiaan informasi pengenal pribadi yang mereka miliki. (Baca 34 PPF 300.612 untuk informasi selengkapnya).

Hak Akses Distrik sekolah dan lembaga negara lainnya yang mengumpulkan, menyimpan, atau menggunakan data pendidikan pribadi harus menjaga kerahasiannya. dan harus memberikan akses kepada Anda untuk memeriksa dan/atau mengkaji data anak Anda. Distrik sekolah harus mematuhi permohonan Anda untuk memeriksa dan mengkaji semua data pendidikan anak Anda dalam 14 hari sejak sekolah menerima permohonan akses dan sebelum rapat tentang PPP atau sidang due process yang tidak memihak (termasuk rapat resolusi atau sidang terkait kedisiplinan).

Data Akses Distrik sekolah harus menyimpan data tentang siapa saja yang telah mengakses data pendidikan yang dikumpulkan, disimpan, atau digunakan berdasarkan IDEA 2004 kecuali Anda dan karyawan resmi distrik sekolah. Data akses ini harus dilengkapi dengan nama pihak, tanggal akses dan tujuan penggunaan data secara resmi oleh pihak tersebut.

Data berisi Lebih dari Satu Anak Apabila sebuah data pendidikan berisi informasi lebih dari satu anak, Anda hanya berhak untuk memeriksa dan meninjau informasi yang berkaitan dengan anak Anda atau diinformasikan hanya tentang informasi tersebut.

Daftar Jenis dan Lokasi Informasi Setelah Anda melakukan permohonan, distrik sekolah harus memberikan daftar jenis dan lokasi data pendidikan yang dikumpulkan, disimpan, atau digunakan oleh lingkungan sekolah.

Hak anda dalam memeriksa dan membaca catatan pendidikan meliputi:

- menerima jawaban dari distrik sekolah atas permohonan penjelasan dan interpretasi informasi tentang data anak Anda;
- meminta agar distrik sekolah memberikan salinan data anak Anda, jika keadaan tidak memungkinkan anda memeriksa dan meninjau data tersebut jika Anda tidak menerima salinan tersebut; dan
- mendapatkan catatan pemeriksaan dan peninjauan yang representatif.

Distrik sekolah dapat menganggap orang tua memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengkaji data terkait anak mereka kecuali distrik sekolah telah diberi tahu bahwa orangtuanya tidak memiliki wewenang berdasarkan undang-undang Nasional yang berlaku dalam hal perwalian, perpisahan, dan perceraian.

Biaya Distrik sekolah dapat menarik biaya untuk salinan data yang dibuat untuk Anda apabila biaya tersebut tidak menghalangi Anda melakukan pemeriksaan dan peninjauan data tersebut. Distrik sekolah dilarang menarik biaya untuk mencari atau mendapatkan data sesuai IDEA 2004.

Amandemen Data atas Permohonan Orang tua Jika Anda yakin bahwa informasi dalam data pendidikan terkait anak Anda yang dikumpulkan, disimpan, atau digunakan tidak akurat, menyimpang, atau melanggar privasi atau hak lain anak Anda berdasarkan IDEA 2004 Bagian B, Anda dapat meminta distrik sekolah yang menyimpan informasi tersebut untuk melakukan amandemen. Distrik sekolah harus memutuskan apakah informasi perlu diubah sesuai dengan permintaan Anda, dan menyampaikan keputusan mereka kepada Anda, dalam jangka waktu yang sesuai sejak menerima permohonan dari Anda.

Kesempatan Sidang Apabila distrik sekolah menolak mengubah informasi sesuai dengan permohonan Anda, distrik sekolah harus memberitahukan penolakan tersebut dan menganjurkan hak sidang untuk tujuan ini dalam jangka waktu tertentu.

Prosedur Sidang Pelaksana sidang harus orang yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam hasil sidang. Anda berhak atas pemberitahuan sidang, agar dapat menunjukkan bukti yang relevan dengan masalah tersebut, dan didampingi atau diwakili oleh satu orang atau lebih, termasuk pengacara. Keputusan sidang harus dibuat dalam waktu yang sesuai dan didasarkan pada bukti yang diajukan dalam sidang. Keputusan harus disertai dengan ringkasan bukti dan alasan pengambilan keputusan tersebut. Apabila, berdasarkan hasil sidang, distrik sekolah memutuskan bahwa informasi tersebut tidak akurat, menyimpang, atau melanggar privasi atau hak lain anak Anda, informasi tersebut harus diubah dan diberitahukan kepada Anda secara tertulis.

Hasil Sidang Jika, berdasarkan hasil sidang, distrik sekolah memutuskan bahwa informasi tersebut tidak akurat, menyimpang, atau melanggar privasi atau hak lain anak Anda, distrik sekolah harus memberitahukan hak Anda untuk menuliskan, di dalam data yang berisi informasi anak Anda, pernyataan yang menjelaskan tentang informasi tersebut atau memberikan alasan mengapa Anda tidak setuju dengan distrik sekolah. Pernyataan tersebut harus disimpan sebagai bagian dari data anak Anda selama data tersebut (atau bagian yang dipersengketakan) masih disimpan oleh distrik sekolah. Jika distrik sekolah mengungkapkan data (atau bagian yang disengketakan) kepada pihak mana pun, penjelasan juga harus disampaikan kepada pihak tersebut.

Persetujuan untuk Pengungkapan Informasi Pengenal Pribadi Apabila informasi tersebut tidak terkandung dalam catatan pendidikan dan pengungkapannya tidak diizinkan tanpa persetujuan orang tua berdasarkan UUHPKK, persetujuan Anda harus diperoleh sebelum informasi pengenal pribadi diungkapkan kepada pihak-pihak selain petugas dari badan yang berpartisipasi. Kecuali dalam keadaan yang disebutkan di bawah ini, persetujuan Anda tidak diperlukan sebelum informasi pengenal pribadi diberikan kepada petugas dari badan yang berpartisipasi guna memenuhi persyaratan IDEA 2004.

Persetujuan Anda, atau persetujuan dari anak yang layak yang telah mencapai usia 18 tahun, harus diperoleh sebelum informasi pengenal pribadi diberikan kepada petugas dari badan yang berpartisipasi yang memberikan atau membayar biaya layanan pemberian informasi.

Jika anak Anda bersekolah di, atau akan masuk ke sekolah swasta yang lokasinya tidak sama dengan distrik sekolah tempat tinggal Anda, persetujuan Anda harus diperoleh sebelum informasi pengenal pribadi tentang anak Anda diberikan kepada petugas di distrik sekolah di mana sekolah swasta tersebut berlokasi dan petugas di distrik sekolah tempat tinggal Anda.

Menjaga Informasi Distrik sekolah Anda harus melindungi informasi pengenal pribadi pada tahap pengumpulan, penyimpanan, pengungkapan dan penghancuran. Satu petugas di setiap distrik sekolah harus mengemban tanggung jawab untuk memastikan kerahasiaan dari setiap informasi pengenal pribadi. Semua orang yang mengumpulkan atau menggunakan informasi pengenal pribadi harus menerima pelatihan atau instruksi terkait kebijakan Negara Bagian dan prosedur terkait kerahasiaan dalam IDEA 2004 dan UUHPKK. Setiap sekolah harus memiliki, untuk pemeriksaan publik, daftar terbaru dari nama-nama dan posisi karyawan di dalam badan yang mungkin memiliki akses ke informasi pengenal pribadi.

Penghancuran Informasi Distrik sekolah Anda harus memberitahu Anda ketika informasi pengenal pribadi yang dikumpulkan, atau digunakan, tidak lagi dibutuhkan untuk menyediakan layanan pendidikan kepada anak Anda. Informasi tersebut harus dihilangkan sesuai permintaan Anda. **Penghilangan** bermakna penghancuran secara fisik atau penghapusan informasi pengenal pribadi sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk mengenali. Namun, distrik sekolah harus menyimpan data permanen dari nama siswa, alamat, dan nomor telepon, nilai, data kehadiran, kelas yang diikuti, jenjang yang diselesaikan dan tahun kelulusan.

Distrik sekolah tidak boleh menghancurkan data pendidikan khusus siswa sebelum ulang tahun siswa yang ke 25, kecuali dengan persetujuan sebelumnya dari orang tua atau, jika memungkinkan, siswa tersebut yang telah dewasa. Distrik sekolah harus menyimpan salinan PPP terakhir yang masih berlaku setelah siswa keluar dari pendidikan khusus hingga dia berulang tahun yang ke-60. Distrik sekolah harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada orang tua atau siswa yang telah dewasa tentang kebijakan penghancuran dokumen pada saat kelulusan siswa dengan ijazah sekolah menengah atas atau pada saat pemindahan hak atau mana pun yang terjadi lebih dulu. Distrik sekolah harus memberikan pemberitahuan umum terkait kebijakan penghancuran dokumennya setidaknya setiap tahun.

Pemindahan Hak Di bawah regulasi UUHPKK dalam 34 PPF 99.5(a), hak-hak orang tua terkait data pendidikan dipindahkan kepada siswa pada usia 18.

Keluhan Pendidikan Khusus

Peraturan New Hampshire tentang Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas ~ Ed 1121

Keputusan orang tua terkait anak mereka harus berdasarkan pengetahuan dan pemahaman akan hak dan prosedur perlindungan mereka. Hal ini membutuhkan komunikasi terbuka dan kepercayaan antara orang tua dan distrik sekolah. Jika muncul masalah, pengaduan *due process* adalah satu metode yang orang tua atau lainnya dapat gunakan untuk mengatasi masalah dengan distrik sekolah.

Proses pengaduan pendidikan khusus **harus mencakup:**

1. pernyataan bahwa distrik sekolah telah melanggar ketentuan IDEA 2004;
2. fakta yang menjadi dasar pernyataan tersebut;
3. tanda tangan dan informasi kontak orang yang mengajukan pengaduan; dan
4. apabila dugaan pelanggaran berhubungan dengan seorang anak tertentu;
 - a. nama dan alamat tempat tinggal anak tersebut;
 - b. nama sekolah tempat anak tersebut bersekolah;
 - c. jika anak tersebut tidak memiliki rumah, informasi kontak yang ada untuk anak tersebut, dan nama dari sekolah anak tersebut;
 - d. deskripsi tentang awal masalah anak tersebut, termasuk fakta-fakta yang berhubungan masalah tersebut; **dan**
 - e. penyelesaian yang ditawarkan selama penyelesaian tersebut diketahui dan tersedia untuk pihak tersebut pada saat pengaduan diajukan.

Keluhan harus berisi tentang dugaan pelanggaran yang terjadi tidak lebih dari satu tahun lalu dari tanggal pengaduan diterima.

Keluhan dikirimkan ke: Komisaris Pendidikan
New Hampshire Department of Education 101 Pleasant Street
Concord, New Hampshire 03301

Orang yang mengajukan pengaduan harus meneruskan salinan pengaduan tersebut kepada distrik sekolah *di saat yang sama ketika pihak tersebut mengajukan pengaduan ke Departemen Pendidikan New Hampshire*. Jika Anda memerlukan informasi selengkapnya tentang prosedur pengaduan, hubungi Departemen Pendidikan New Hampshire, Biro Pendidikan Khusus.

Prosedur Pengaduan

1. Setelah menerima pengaduan yang diajukan oleh orang tua, organisasi atau individu Negara Bagian lain, pengaduan akan dikaji oleh Kantor Keluhan dari Biro Pendidikan Khusus di Departemen Pendidikan NH.
2. Setelah distrik sekolah menerima salinan pengaduan dari pihak yang mengeluh, distrik sekolah dapat memilih untuk membuat Proposal Penyelesaian Masalah. Proposal Penyelesaian Masalah adalah rencana tertulis yang dikembangkan oleh distrik sekolah yang menawarkan tindakan dari distrik yang diyakini akan menyelesaikan satu, beberapa, atau semua dugaan pelanggaran dalam pengaduan. Proposal ini diberikan kepada orang tua agar kedua pihak menyepakati suatu penyelesaian. Jika orang tua dan distrik sekolah menyepakati satu, beberapa, atau semua penyelesaian untuk dugaan pelanggaran, pengaduan pendidikan khusus dapat dilanjutkan untuk masalah yang tersisa. Setelah orang tua dan distrik menyepakati Proposal Penyelesaian Masalah, pihak yang mengajukan pengaduan harus memberitahukan kepada Departemen Pendidikan bahwa mereka menarik pengaduan tersebut.

3. Jika masalah-masalahnya sesuai untuk prosedur pengaduan, maka:
 - a. penyelidik independen akan ditunjuk untuk kasus tersebut guna melakukan penyelidikan mandiri, yang mana sebagian darinya dapat dijalankan di distrik sekolah;
 - c. surat akan dikirim kepada pihak orang tua dan distrik sekolah yang menyebutkan nama penyidiknya, salinan surat pengaduan dan menentukan regulasi federal dan/atau Negara Bagian apa saja yang tercakup.
4. Orang yang mengajukan pengaduan harus diberikan kesempatan untuk mengoreksi setiap kesalahan dalam merangkum masalah yang dikeluhkan dan boleh menyerahkan informasi tambahan baik secara lisan maupun tulisan.
5. Penyelidik akan mengkaji semua informasi yang relevan, termasuk data pendidikan yang sesuai, dan dapat mewawancarai Anda dan petugas dan staf distrik sekolah secara langsung atau melalui telepon untuk menemukan fakta-fakta. Setelah penyelidikan selesai, penyelidik akan menyerahkan laporan tertulis kepada Departemen Pendidikan NH.
6. Koordinator Resolusi Perselisihan dari Departemen Pendidikan NH untuk Keluhan Pendidikan Khusus akan mengkaji laporan tersebut untuk menetapkan apakah telah terjadi pelanggaran.
7. Komisaris Pendidikan mengkaji informasi tersebut dan membuat keputusan tentang tindakan perbaikan apa, termasuk penggantian uang jika ada, yang diberikan, yang sesuai dengan kebutuhan anak. Komisaris menandatangani keputusan tersebut. Keputusan akan diterbitkan paling lambat 60 hari setelah pengaduan diterima oleh Departemen Pendidikan NH. Tenggat waktu tersebut dapat diperpanjang jika Departemen menetapkan bahwa ada kondisi luar biasa yang menunda keputusan tersebut.
8. Setiap pihak dalam pengaduan tersebut dapat, sejak 20 hari penerimaan keputusan tertulis komisioner di bawah Ed. 1121.02(b), membuat permohonan tertulis kepada komisioner untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Setiap tindakan perbaikan yang diperintahkan oleh komisioner untuk keuntungan anak penyandang disabilitas harus dilaksanakan dan dilanjutkan hingga selesainya pertimbangan ulang dan, kecuali dibatalkan atau tetap berlaku setelah pertimbangan ulang, selama pengajuan banding.
9. Jika Departemen Pendidikan NH menetapkan bahwa ada kegagalan dalam memberikan layanan yang layak, Departemen dapat memberikan penggantian uang atau tindakan perbaikan lain yang sesuai dengan kebutuhan anak dan untuk memastikan layanan yang sesuai diberikan kepada semua anak penyandang disabilitas di masa mendatang.

Contoh Formulir Departemen Pendidikan NH telah membuat contoh formulir untuk membantu Anda mengajukan pengaduan due process dan pengaduan tingkat Negara Bagian. Formulir ini dapat diperoleh dengan menghubungi sekolah anak Anda, Departemen Pendidikan NH, 101 Pleasant Street Concord, N.H. 03301 atau di situs web Departemen: http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/complaint.htm. Anda tidak harus menggunakan formulir model ini. Anda dapat menggunakan formulir ini atau formulir model lain yang sesuai, selama mengandung informasi yang dibutuhkan untuk mengajukan pengaduan due process atau pengaduan tingkat Negara Bagian.

Penyelesaian Perselisihan Alternatif

Peraturan New Hampshire tentang Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas ~ Ed 1122

Orang tua dan distrik sekolah berusaha menyelesaikan perselisihan dengan cara yang paling baik. Ketika Anda memiliki masalah atau perselisihan dengan distrik sekolah, upaya untuk menyelesaikannya harus dimulai pada tingkat administratif yang paling rendah. Ketika upaya tersebut tidak memungkinkan atau tidak berhasil, metode alternatif penyelesaian perselisihan formal seperti mediasi atau pertemuan netral mungkin dapat menjadi pilihan. Distrik sekolah dapat membuat prosedur yang menawarkan kepada Anda, dan sekolah yang tidak memilih proses mediasi, kesempatan untuk bertemu di waktu dan lokasi yang diinginkan bersama ditemani seseorang yang tidak memiliki kepentingan pribadi atau profesional. Jika alternatif tersebut tidak sesuai atau berhasil, pengaduan due process dapat diajukan ke salah satu pihak untuk dilanjutkan ke sidang due process.

Pertemuan netral Pertemuan netral adalah pilihan yang terbuka baik Anda dan distrik sekolah. Pertemuan ini merupakan suatu proses yang dijalankan secara rahasia dan sukarela yang difasilitasi oleh seorang profesional yang telah terlatih (netral). Dia mendengarkan kedua pihak yang berselisih dan memberikan saran yang dapat diterima atau ditolak oleh kedua pihak. Orang tua dapat meminta distrik sekolah anaknya untuk mengajukan permintaan kepada Departemen Pendidikan NH. Pertemuan netral adalah layanan bebas biaya yang diberikan oleh Departemen Pendidikan NH. Jika Anda memerlukan informasi selengkapnya, hubungi Kantor Legislasi dan Persidangan di (603) 271-2299.

Mediasi dapat digunakan untuk penyelesaian perselisihan antara Anda dan distrik sekolah yang melibatkan masalah apa pun di bawah IDEA 2004 yang menjelaskan proses pendidikan khusus termasuk masalah yang muncul sebelum dilakukan pengaduan due process. Dengan begitu, mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan di bawah IDEA 2004, terlepas Anda mengajukan pengaduan untuk meminta sidang due process atau tidak.

Prosedur tersebut harus memastikan bahwa proses mediasi:

- dilakukan secara sukarela oleh Anda dan pihak distrik sekolah;
- tidak digunakan untuk menolak atau menunda hak Anda untuk mendapatkan proses sidang, atau menolak hak lain yang Anda miliki di bawah IDEA 2004; **dan**
- dilaksanakan oleh mediator yang memenuhi kualifikasi dan tidak memihak dan telah diberi pelatihan teknik mediasi yang efektif.

Distrik Sekolah Distrik sekolah dapat membuat prosedur yang dapat ditawarkan kepada Anda dan sekolah Anda jika proses mediasi tidak dipilih. Distrik sekolah dapat menawarkan Anda kesempatan untuk bertemu, di tempat dan lokasi yang nyaman bagi Anda, ditemani orang yang tidak memiliki kepentingan pribadi atau profesional dalam hasil perselisihan yang akan diselesaikan:

- yang berada di bawah kontrak dengan entitas penyelesaian perselisihan alternatif yang sesuai, atau Pusat Informasi Induk atau pusat sumberdaya orang tua masyarakat di New Hampshire; **dan**
- yang akan menjelaskan manfaatnya dan mendukung penggunaan proses mediasi tersebut kepada Anda.

Departemen Pendidikan New Hampshire Departemen Pendidikan NH memiliki daftar orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai mediator dan mengetahui undang-undang dan regulasi tentang penetapan pendidikan khusus dan layanan yang terkait. Departemen Pendidikan NH harus memilih mediator secara acak, berotasi, atau cara pemilihan lain yang tidak memihak.

Departemen Pendidikan NH bertanggung jawab atas biaya proses mediasi, termasuk biaya pertemuan. Setiap rapat dalam proses mediasi harus dijadwalkan dengan tepat waktu dan diadakan di tempat yang nyaman bagi Anda dan distrik sekolah.

Jika Anda dan distrik sekolah menyelesaikan masalah melalui proses mediasi, kedua pihak harus menandatangani kesepakatan yang mengikat, menetapkan penyelesaiannya, dan yang:

- menyatakan bahwa semua pembicaraan yang terjadi selama proses mediasi akan tetap dirahasiakan dan tidak boleh digunakan sebagai bukti dalam sidang due process selanjutnya atau persidangan sipil; dan
- ditandatangani oleh Anda dan perwakilan distrik sekolah yang memiliki wewenang untuk menandatangani kesepakatan yang mengikat distrik sekolah.

Kesepakatan mediasi tertulis berlaku di pengadilan Negara Bagian di yurisdiksi mana pun yang berkompeten (pengadilan yang memiliki wewenang di bawah undang-undang Negara Bagian untuk sidang kasus semacam ini) atau di pengadilan distrik di Amerika Serikat. Pembicaraan yang terjadi selama proses mediasi harus dirahasiakan. Pembicaraan tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam sidang due process lain di masa depan atau persidangan sipil di pengadilan Federal mana pun atau Pengadilan Negara Bagian dari Negara Bagian yang menerima bantuan IDEA 2004.

Ketidakterpilih sebagai Mediator Mediator:

- bukan merupakan karyawan Badan Pendidikan Negara Bagian (BPNB) atau distrik sekolah yang terlibat dalam pendidikan atau perawatan anak Anda; **dan**
- tidak memiliki kepentingan pribadi atau profesional yang bertentangan dengan objektivitas mediator.

Seseorang yang berkualifikasi sebagai mediator bukanlah karyawan distrik sekolah atau badan Negara Bagian karena dia dibayar oleh badan atau distrik sekolah untuk menjadi mediator.

Prosedur Pengaduan Due Process

Peraturan New Hampshire tentang Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas ~ Ed 1123

Informasi Umum terkait Pengaduan Due Process Anda atau distrik sekolah dapat mengajukan sidang due process tentang apa pun yang berkaitan dengan penawaran atau penolakan untuk memulai atau mengubah identifikasi, evaluasi, atau penempatan pendidikan anak Anda, atau penyediaan Pendidikan Publik yang Gratis dan Sesuai (PPGS) untuk Anak Anda. Jenjang waktu untuk prosedur persidangan adalah 45 hari, belum termasuk 30 hari penyelesaian. Distrik sekolah harus menawarkan rapat penyelesaian jika orang tua meminta sidang due process.

Pengaduan due process harus menduga suatu pelanggaran yang telah terjadi tidak lebih dari dua tahun sebelum Anda atau distrik sekolah tahu tentang dugaan tindakan yang menjadi dasar pengaduan due process. Jika Anda meminta pengaduan due process untuk memperoleh kembali biaya penempatan unilateral, Anda harus mengajukan permintaan dalam 90 hari sejak penempatan unilateral.

Waktu di atas tidak berlaku jika Anda tidak dapat mengajukan pengaduan due process dalam waktu yang ditetapkan karena distrik sekolah:

- salah mengartikan bahwa mereka telah menyelesaikan masalah yang tertera dalam pengaduan; **atau**
- menunda sampainya informasi yang harus diberikan kepada Anda berdasarkan IDEA 2004.

Distrik sekolah harus menyampaikan setiap biaya atau biaya layanan hukum yang kecil dan layanan lain yang berkaitan dengan bidang tersebut jika Anda meminta informasinya, **atau** jika Anda atau distrik sekolah mengajukan pengaduan due process.

Mengajukan Pengaduan Due Process Untuk meminta sidang, Anda atau distrik sekolah (pengacara Anda atau pengacara sekolah) harus mengajukan pengaduan due process kepada pihak lainnya. Pengaduan tersebut harus berisi semua konten yang disebutkan di bawah dan harus dirahasiakan.

Anda atau distrik sekolah, siapa pun yang mengajukan pengaduan, juga harus memberikan salinan pengaduan tersebut kepada Departemen Pendidikan NH. Sidang due process tidak boleh diselenggarakan sampai pengaduan diajukan.

Proses pengaduan harus mencakup:

1. nama anak;
2. alamat tempat tinggal anak;
3. nama sekolah anak;
4. informasi kontak anak dan nama sekolah anak (jika anak tersebut tidak memiliki rumah);
5. deskripsi tentang sifat masalah anak yang berkaitan dengan tindakan yang ditawarkan atau ditolak, termasuk fakta-fakta terkait masalah; **dan**
6. penyelesaian yang ditawarkan untuk masalah tersebut selama penyelesaian diketahui dan tersedia untuk Anda atau sekolah pada saat pengaduan diajukan.

Pengaduan Due Process Agar diteruskan, pengaduan *due proses* harus dianggap cukup. Pengaduan akan dianggap cukup (memenuhi konten yang diperlukan di atas), kecuali pihak yang menerima pengaduan (Anda atau distrik sekolah) memberitahu bahwa pihak penerima menganggap pengaduan belum memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas kepada petugas persidangan dan pihak lain, secara tertulis, dalam 15 hari sejak penerimaan pengaduan.

Petugas persidangan harus menentukan apakah pengaduan *due process* tersebut memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas, dan secepatnya memberitahu Anda dan distrik sekolah secara tertulis dalam 5 hari sejak penerimaan pemberitahuan bahwa pihak penerima (Anda atau distrik sekolah) menganggap pengaduan tidak cukup,

Jika salah satu pihak meminta persidangan dipercepat, pemberitahuan juga harus menyatakan dasar-dasar hukum untuk permintaan tersebut.

Perubahan pada Pengaduan Anda atau distrik sekolah dapat membuat perubahan pada pengaduan *due process* hanya jika:

- pihak lain menyetujui perubahan tersebut secara tertulis dan diberikan peluang untuk menyelesaikan sidang melalui rapat penyelesaian yang dijelaskan di bawah; **atau**
- selambat-lambatnya lima hari sebelum sidang *due process* dimulai, petugas persidangan memberi izin untuk perubahan tersebut.

Jika pihak yang mengadu (Anda atau distrik sekolah) membuat perubahan pada pengaduan *due process*, waktu untuk pertemuan penyelesaian (15 hari sejak menerima pengaduan) dan penyelesaian (30 hari sejak penerimaan pengaduan) dimulai lagi pada tanggal pengubahan pengaduan yang diajukan.

Respons Distrik Sekolah terhadap Pengaduan Due Process Jika distrik sekolah belum mengirimkan Pemberitahuan Awal Tertulis (PAS) kepada Anda terkait masalah yang terkandung dalam pengaduan *due process*, distrik sekolah harus, dalam 10 hari sejak penerimaan pengaduan *due process*, mengirimkan respon kepada Anda yang mencakup:

- penjelasan mengapa distrik sekolah menawarkan atau menolak untuk mengambil tindakan yang ada dalam pengaduan *due process*;
- penjelasan pilihan lain yang dipertimbangkan oleh Tim Program Pendidikan Perorangan (PPP) anak Anda dan alasan mengapa pilihan tersebut ditolak;
- penjelasan dari masing-masing prosedur evaluasi, penilaian, data, atau laporan yang digunakan distrik sekolah sebagai dasar tindakan yang ditawarkan atau yang ditolak: **dan**
- penjelasan faktor lain yang berkaitan dengan tindakan yang ditawarkan atau yang ditolak oleh distrik sekolah.

Memberikan informasi dalam poin-poin di atas tidak menghalangi distrik sekolah untuk menegaskan bahwa pengaduan *due process* Anda belum cukup.

Respons Orang Tua terhadap Pengaduan Due Process Ketika distrik sekolah, dan pihak lain mengajukan pengaduan *due process*, Anda, sebagai pihak penerima, harus mengirim respon yang secara khusus menjawab masalah dalam pengaduan tersebut kepada distrik sekolah dan pihak lainnya 10 hari sejak penerimaan pengaduan.

Permintaan Terpisah untuk Sidang Due Process Bagian mana pun dari prosedur pengamanan dalam regulasi Federal berdasarkan Bagian B dari IDEA 2004 (34 PPF §§300.500 sampai 300.536) tidak dapat diartikan untuk mencegah Anda mengajukan pengaduan *due process* terpisah terkait masalah yang berbeda dari pengaduan *due process* yang telah diajukan.

Mediasi Mediasi dapat digunakan untuk penyelesaian perselisihan antara Anda dan distrik sekolah yang melibatkan masalah apa pun berdasarkan IDEA 2004 yang menjelaskan proses pendidikan khusus termasuk masalah yang muncul sebelum dilakukan pengaduan due process. Dengan begitu, mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan IDEA 2004, terlepas Anda mengajukan permintaan sidang due process atau tidak.

Persyaratan Mediasi

- dilakukan secara sukarela oleh Anda dan pihak distrik sekolah;
- tidak digunakan untuk menolak atau menunda hak Anda untuk mendapatkan proses sidang, atau menolak hak lain yang Anda miliki berdasarkan IDEA 2004; **dan**
- dilaksanakan oleh mediator yang sudah memenuhi kualifikasi, tidak memihak, dan telah mengikuti pelatihan teknik mediasi yang efektif.

Departemen Pendidikan NH memiliki daftar orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai mediator dan mengetahui undang-undang dan regulasi tentang penentuan pendidikan khusus dan layanan terkait. Mediator dipilih secara acak, berotasi, atau dengan cara pemilihan lain yang tidak memihak. Biaya mediasi ditanggung oleh Departemen Pendidikan NH.

Ketidakberpihakan Mediator Mediator:

- bukan merupakan karyawan Badan Pendidikan Negara Bagian atau distrik sekolah yang terlibat dalam pendidikan atau perawatan anak Anda; **dan**
- tidak memiliki kepentingan pribadi atau profesional yang bertentangan dengan objektivitas mediator.

Seseorang yang memenuhi kualifikasi sebagai mediator bukanlah karyawan distrik sekolah atau badan Negara Bagian karena dia dibayar oleh badan atau distrik sekolah untuk menjadi mediator.

Setiap rapat dalam proses mediasi harus dijadwalkan dengan tepat waktu dan diadakan di tempat yang nyaman bagi Anda dan distrik sekolah.

Jika Anda dan distrik sekolah menyelesaikan masalah melalui proses mediasi, kedua pihak harus menandatangani kesepakatan yang mengikat, menetapkan penyelesaian, dan yang:

- menyatakan bahwa semua pembicaraan yang terjadi selama proses mediasi akan tetap dirahasiakan dan tidak boleh digunakan sebagai bukti dalam sidang due process selanjutnya atau di persidangan sipil; **dan**
- ditandatangani oleh Anda dan perwakilan distrik sekolah yang memiliki wewenang untuk menandatangani kesepakatan.

Kesepakatan mediasi tertulis berlaku di pengadilan Negara Bagian di yurisdiksi mana pun yang berkompeten (pengadilan yang memiliki wewenang di bawah undang-undang Negara Bagian untuk sidang kasus semacam ini) atau di pengadilan distrik di Amerika Serikat.

Penempatan Anak Ketika Pengaduan Due Process dan Persidangan Ditunda Anak Anda harus tetap berada di penempatan pendidikannya saat ini selama masa due process kecuali di bawah ketentuan “penempatan alternatif karena pencabutan hukum.” Jika pengaduan due process melibatkan pengajuan pendaftaran awal ke sekolah umum, anak Anda, melalui persetujuan dari Anda, harus ditempatkan di program sekolah umum reguler hingga penyelesaian persidangan tersebut.

Jika pengaduan due process melibatkan pendaftaran untuk layanan awal bagi transisi anak Anda dari Bantuan dan Layanan Dini berdasarkan Bagian C dari IDEA 2004 atau karena anak Anda telah berusia tiga tahun, distrik sekolah tidak wajib memberikan bantuan dan layanan dini yang telah diterima anak Anda. Jika anak Anda layak berdasarkan IDEA 2004 dan Anda setuju anak Anda menerima pendidikan khusus dan layanan terkait untuk pertama kalinya, kemudian, menunda hasil persidangan, distrik sekolah harus memberikan pendidikan khusus dan layanan terkait yang tidak ada dalam perselisihan (yang telah disetujui oleh Anda dan distrik sekolah).

Rapat Penyelesaian Dalam 15 hari kerja sejak penerimaan pemberitahuan pengaduan, dan sebelum sidang dimulai, distrik sekolah harus mengadakan rapat penyelesaian dengan Anda dan anggota terkait atau anggota tim Program Pendidikan Perorangan (PPP) yang memiliki pengetahuan khusus pada fakta-fakta yang disebutkan dalam pengaduan due process Anda. Rapat tersebut:

- Harus melibatkan perwakilan distrik sekolah yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan atas nama distrik sekolah; **dan**
- Tidak boleh melibatkan pengacara distrik sekolah kecuali Anda juga didampingi oleh pengacara.

Tujuan rapat tersebut adalah untuk membicarakan pengaduan due process Anda, dan fakta-fakta yang menjadi dasar pengaduan tersebut, sehingga distrik sekolah berkesempatan untuk menyelesaikan sengketa. Rapat penyelesaian tidak diperlukan jika:

- Anda dan distrik sekolah setuju secara tertulis untuk meniadakan rapat; **atau**
- Anda dan distrik sekolah setuju untuk menggunakan proses mediasi.

Periode Penyelesaian Jika distrik sekolah belum memberikan penyelesaian yang memuaskan dalam 30 hari sejak menerima pengaduan sidang due process dari Anda (selama periode proses penyelesaian), sidang due process akan dilakukan.

Periode 45 hari untuk menetapkan keputusan akhir dimulai sejak berakhirnya 30 hari periode penyelesaian, kecuali ada penyesuaian pada 30 hari periode penyelesaian, seperti yang dijelaskan di bawah. Atau, jika Anda dan distrik sekolah menyetujui untuk meniadakan proses penyelesaian atau menggunakan mediasi, ketidakhadiran Anda dalam pertemuan penyelesaian akan menunda periode proses penyelesaian dan sidang due process sampai Anda mau berpartisipasi dalam pertemuan.

Jika, setelah melakukan upaya yang wajar dan mencatat upaya tersebut, distrik sekolah tidak dapat bertemu dengan Anda dalam pertemuan penyelesaian, distrik sekolah meminta petugas persidangan untuk membatalkan pengaduan due process Anda pada akhir periode penyelesaian 30 hari.

Dokumentasi upaya tersebut harus mencakup data tentang upaya distrik sekolah untuk menentukan waktu dan tempat untuk bertemu, seperti:

- data panggilan telepon yang terperinci atau upaya dan hasil dari panggilan tersebut;
- salinan korespondensi yang dikirimkan kepada Anda dan balasan yang diterima; dan
- data kunjungan ke rumah atau tempat kerja Anda yang terperinci dan hasil dari kunjungan tersebut.

Jika distrik sekolah gagal untuk mengadakan rapat penyelesaian dalam 15 hari sejak penerimaan pemberitahuan pengaduan due process Anda **atau** tidak hadir dalam rapat penyelesaian, Anda dapat meminta petugas persidangan untuk memerintahkan agar periode sidang due process yang berjumlah 45 hari dimulai.

Penyesuaian pada 30 Hari Periode Penyelesaian Jika Anda dan distrik sekolah setuju secara tertulis untuk meniadakan pertemuan penyelesaian, maka periode 45 hari untuk sidang due process akan dimulai esok harinya.

Setelah mediasi atau pertemuan penyelesaian dimulai dan sebelum 30 hari akhir periode penyelesaian, jika Anda dan distrik sekolah setuju secara tertulis bahwa tidak ada kesepakatan yang memungkinkan, maka periode 45 hari untuk sidang due process akan dimulai esok harinya.

Jika Anda dan distrik sekolah setuju untuk menggunakan proses mediasi, pada akhir periode 30 hari, kedua pihak dapat menyetujui secara tertulis untuk melanjutkan mediasi hingga sebuah kesepakatan tercapai. Namun, jika Anda atau distrik sekolah mundur dari proses mediasi, maka periode 45 hari untuk sidang due process akan dimulai esok harinya.

Kesepakatan Penyelesaian Tertulis Jika penyelesaian perselisihan tercapai pada saat pertemuan penyelesaian, Anda dan distrik sekolah harus menandatangani kesepakatan yang mengikat secara hukum yang:

- ditandatangani oleh Anda dan perwakilan distrik sekolah yang memiliki wewenang untuk menandatangani kesepakatan yang mengikat distrik sekolah; **dan**
- berlaku di semua pengadilan Negara bagian mana pun dari yurisdiksi yang berkompeten (pengadilan yang memiliki wewenang di bawah undang-undang Negara Bagian untuk menyidangkan kasus semacam ini) atau di pengadilan distrik di Amerika Serikat atau oleh Badan Pendidikan Negara Bagian, jika Negara bagian Anda memiliki mekanisme atau prosedur lain yang mengizinkan pihak lain untuk mendapatkan pemberlakuan atas kesepakatan penyelesaian tersebut.

Periode Peninjauan Kesepakatan Jika Anda dan distrik sekolah menghasilkan kesepakatan dari pertemuan penyelesaian, salah satu pihak (Anda atau distrik sekolah) dapat membatalkan kesepakatan dalam 3 hari kerja sejak Anda dan distrik sekolah menandatangani kesepakatan tersebut.

Sidang Due Process yang tidak Memihak

Peraturan New Hampshire tentang Pendidikan anda Anak Penyandang Disabilitas ~ Ed 1123

Di New Hampshire, Departemen NH bertanggung jawab untuk mengadakan sidang due process dan pengajuan banding dari keputusan sidang due process langsung ke pengadilan.

Departemen Pendidikan NH akan menjadwalkan tanggal untuk pertemuan pra-sidang dan proses sidang. Petugas Persidangan mengadakan rapat pra-sidang untuk mengklarifikasi masalah yang akan dibahas dalam persidangan. Rapat pra-sidang juga merupakan kesempatan untuk membicarakan tawaran penyelesaian.

Sidang due process diadakan paling lambat 14 hari setelah akhir dari rapat pra-sidang. Kecuali untuk tujuan yang baik, penyelenggaraan sidang due process dibatasi menjadi 2 hari.

Hak-Hak Sidang Masing-masing pihak, dalam sidang due process (termasuk sidang terkait prosedur hukum) berhak untuk:

- didampingi dan diberi saran oleh pengacara dan/atau orang yang memiliki pengetahuan khusus atau pelatihan tentang masalah anak penyandang disabilitas;
- menampilkan bukti dan membantah, saling memeriksa, dan mendatangkan saksi;
- melarang pengenalan setiap bukti setidaknya lima hari sebelum persidangan;
- memperoleh catatan kata per kata secara tertulis atau data elektronik, sesuai dengan pilihan Anda, dari persidangan tersebut; **dan**
- memperoleh data kesimpulan dan keputusan secara tertulis atau dalam bentuk data elektronik sesuai dengan pilihan Anda.

Hak Tambahan Orang Tua pada Persidangan Anda berhak untuk:

- menghadirkan anak Anda;
- membuka sidang untuk publik; **dan**
- memiliki catatan sidang, temuan fakta, dan keputusan yang diberikan kepada Anda tanpa biaya sepeserpun.

Pengungkapan Informasi Tambahan Setidaknya lima hari sebelum sidang due process, Anda dan distrik sekolah harus saling membuka semua bukti dokumen, daftar saksi, dan evaluasi, termasuk evaluasi mandiri, dilengkapi dengan tanggal dan rekomendasi yang didasarkan pada evaluasi yang ingin Anda dan distrik sekolah gunakan dalam sidang. Petugas sidang dapat melarang pihak yang tidak mematuhi persyaratan ini untuk menampilkan evaluasi atau rekomendasi terkait pada sidang tanpa persetujuan pihak lain.

Topik Pembahasan Sidang Due Process Pihak (Anda atau distrik sekolah) yang meminta sidang due process tidak boleh membahas masalah yang belum disebutkan dalam pengaduan dalam sidang due process, kecuali pihak yang lain menyetujui.

Petugas Persidangan yang tidak Memihak Setidaknya, seorang petugas persidangan:

- bukan merupakan karyawan Badan Pendidikan Negara Bagian atau distrik sekolah yang terlibat dalam pendidikan atau perawatan anak tersebut. Namun, seseorang tidak serta-merta disebut karyawan badan pendidikan hanya karena dia dibayar untuk menjadi mediator;
- tidak memiliki kepentingan pribadi atau profesional yang bertentangan dengan objektivitas petugas persidangan;
- harus berpengetahuan dan memahami ketentuan dari IDEA 2004, dan regulasi Federal dan Negara Bagian yang berhubungan dengan IDEA 2004, dan interpretasi hukum pada IDEA 2004 oleh pengadilan Federal dan Negara bagian; **dan**
- harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengadakan sidang, membuat dan menulis keputusan, serta konsisten dengan praktik hukum yang benar dan standar.

Keputusan Persidangan Keputusan petugas persidangan pada penerimaan Pendidikan Publik yang Gratis dan Sesuai (PPGS) harus didasarkan pada dasar-dasar yang substantif. Dalam hal dugaan pelanggaran prosedural, petugas persidangan mungkin mendapati bahwa anak Anda tidak menerima PPGS hanya jika kurangnya prosedural:

- mengganggu hak anak Anda terhadap pendidikan publik yang gratis dan sesuai (PPGS);
- sangat mengganggu kesempatan Anda untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai Penyediaan Pendidikan Publik yang Gratis dan Sesuai (PPGS) kepada anak Anda; **atau**
- menyebabkan berkurangnya manfaat pendidikan.

Jika Anda atau distrik sekolah tidak setuju dengan keputusan Petugas Persidangan, para pihak dapat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi N.H. atau pengadilan federal dalam 120 hari sejak mereka menerima keputusan terakhir.

Pembuatan Pasal Tak satu pun ketentuan yang dijelaskan di atas dapat mencegah petugas persidangan dalam memerintah distrik sekolah untuk mematuhi persyaratan dalam bagian prosedur perlindungan dari regulasi Federal berdasarkan IDEA 2004 (34 PPF §§300.500 sampai 300.536).

Temuan dan Keputusan Panel Penasihat dan Masyarakat Umum Departemen Pendidikan NH, setelah penghapusan Informasi Pengenal Pribadi, harus:

- memberikan temuan dan keputusan dalam sidang due process atau banding kepada panel pengawasan; **dan**
- membuat temuan dan keputusan tersebut dapat diakses oleh masyarakat.

Percepatan Sidang: Sidang Due Process dalam 45 Hari Tanpa Perpanjangan Departemen Pendidikan NH akan menjadwalkan persidangan dalam 20 hari sekolah sejak penerimaan permohonan persidangan. Sesi penyelesaian harus diadakan dalam 7 hari dan keputusan diberikan dalam 10 hari sekolah. Percepatan persidangan akan dijadwalkan ketika diminta jika:

1. Distrik sekolah berpikir bahwa jika sang anak tetap berada dalam program sekolah saat ini, kemungkinan akan melukai sang anak atau yang lainnya dan oleh karena itu distrik sekolah ingin menempatkan anak tersebut di tempat pendidikan alternatif selama kurang lebih 45 hari, dan orang tua tidak menyetujuinya;
2. orang tua meyakini bahwa anak tersebut telah dilarang masuk sekolah selama 10 hari berturut-turut **atau** 10 hari dalam satu tahun sekolah di mana sekolah tersebut tidak mengikuti prosedur yang benar;
 - a) orang tua tidak setuju dengan sekolah yang menempatkan anaknya di tempat pendidikan alternatif sementara; atau
 - b) orang tua tidak setuju dengan manifestasi penetapan keputusan.

Ketika seorang anak ditempatkan dalam Tempat Pendidikan Alternatif Sementara (TPAS) selama 45 hari, sang anak harus tetap berada dalam penempatan tersebut hingga:

- (1) Petugas Persidangan membuat keputusan yang berbeda,
- (2) periode 45 hari telah selesai, atau
- (3) para pihak menyepakati penempatan yang berbeda. Dalam kasus perselisihan, TPAS menjadi penempatan anak untuk “tetap tinggal” selama sisa 45 hari. Setelah periode 45 hari selesai, sang anak kembali ke program sekolah sebelumnya, kecuali Petugas Persidangan memerintahkan TPAS lagi.

Penetapan Akhir Keputusan, Banding, Peninjauan tanpa Memihak Jika orang tua atau distrik sekolah tidak setuju dengan Petugas Persidangan, mereka dapat mengajukan banding di pengadilan tinggi negara bagian atau pengadilan federal dalam 120 hari sejak mereka menerima keputusan akhir dari Petugas Persidangan.

Pengadilan yang *menangani* banding akan menerima data dari sidang due process dan akan mendengarkan bukti tambahan jika diminta oleh pihak orang tua atau distrik sekolah. Pengadilan akan membuat keputusan dari banding tersebut dan memberikan keringanan yang sesuai, jika ada, berdasarkan pengaruh yang lebih besar (51% atau lebih) dari bukti tersebut.

Tidak satu pun dalam bagian ini yang melarang atau membatasi hak, prosedur, dan perbaikan yang tersedia berdasarkan Konstitusi, Undang-Undang tentang Warga Negara Amerika penyandang Disabilitas tahun 1990, Poin ke V dari Undang-Undang Rehabilitasi tahun 1973, atau undang-undang Federal yang melindungi hak anak-anak penyandang disabilitas, kecuali sebelum pengajuan tindakan sipil di bawah undang-undang ini telah mencari keringanan yang juga tersedia berdasarkan 300.507 dan 300.510 (3/99) harus digunakan sebagaimana mestinya jika tindakan tersebut berkaitan dengan bagian ke 615 dari Undang-Undang tersebut.

Periode, Kenyamanan Persidangan dan Peninjauan Departemen Pendidikan NH harus memastikan periode 45 hari setelah berakhirnya periode 30 hari untuk rapat penyelesaian **atau**, sebagaimana dijelaskan di bawah sub-judul **Penyesuaian pada Periode Penyelesaian 30 Hari**, paling lambat 45 hari setelah berakhirnya waktu penyesuaian:

- Keputusan akhir telah tercapai dalam persidangan; **dan**
- salinan keputusan telah dikirimkan kepada masing-masing pihak.

Petugas persidangan dapat memberikan perpanjangan khusus melebihi 45 hari, seperti dijelaskan di atas, berdasarkan permintaan salah satu pihak.

Setiap persidangan harus diselenggarakan dalam waktu dan tempat yang nyaman bagi Anda dan anak Anda.

Tindakan Sipil, Termasuk Periode Waktu Pengajuan Setiap pihak (Anda atau distrik sekolah) yang tidak setuju dengan simpulan dan keputusan dalam sidang due process (termasuk persidangan yang berkaitan dengan prosedur hukum) berhak untuk mengambil tindakan sipil berkaitan dengan topik dalam sidang due process. Pengajuan banding atas keputusan akhir Petugas Persidangan harus diajukan ke pengadilan negara bagian atau pengadilan federal dalam 90 hari sejak penerimaan keputusan Petugas Persidangan tersebut. Semua keputusan harus dikirimkan oleh Departemen Pendidikan NH kepada alamat pos resmi kedua pihak, bukti penerimaan akan diminta.

Penggantian Biaya Pengacara dan Biaya Saksi Ahli Berlaku mulai 1 Januari, 2009; Berdasarkan NH RST 186- C:16(b)(V) Suatu tindakan yang sesuai dengan 20 U.S.C. ayat 1415(i)(3) permintaan penggantian biaya pengacara atau biaya saksi ahli harus dilakukan dalam 120 hari sejak penerimaan keputusan akhir sesuai dengan RST 186-C:16-b, IV. Semua keputusan harus dikirimkan oleh Departemen Pendidikan NH kepada alamat pos resmi kedua pihak.

1. Pengadilan dapat mengganti biaya orang tua dari anak penyandang disabilitas untuk biaya saksi ahli sebagai bagian dari pengaduan due process jika orang tua tersebut adalah pihak yang menang dan jika pengadilan menetapkan bahwa sekolah tidak bertindak, dengan niat baik, untuk mengembangkan atau menerapkan program pendidikan perorangan bagi anak tersebut, termasuk penempatan yang sesuai.
2. pengadilan dapat menolak atau mengurangi penggantian biaya saksi ahli jika petugas persidangan menetapkan:
 - a) saksi ahli bukan komponen penting untuk pengaduan due process orang tua;
 - b) biaya saksi ahli melebihi jumlah yang wajar, mengingat tipe dan lokasi layanan yang diberikan dan ketrampilan, reputasi, dan pengalaman dari saksi ahli tersebut;
 - c) orang tua atau pengacara orang tua, tidak memberikan pemberitahuan kepada distrik sekolah bahwa mereka berniat untuk mendatangkan saksi ahli dalam sidang due process.

Persoalan Pasca Sidang dan Biaya Pengacara

Peraturan New Hampshire tentang Pendidikan Anak penyandang Disabilitas ~ Ed 1123.22, 34 CFR 300.517 dan RST 186-C:16-b, V

Orang tua yang merupakan pihak yang menang (mendapat keputusan yang menguntungkan, atau dalam beberapa kasus, keputusan yang pada dasarnya menguntungkan) pada saat sidang due process atau banding atas keputusan Hakim, berhak atas penggantian biaya pengacara dengan jumlah yang wajar. Menurut RSA 186 – C:16-b, (V) orang tua harus mengajukan permintaan penggantian biaya pengacara di pengadilan negara bagian atau federal dalam waktu 120 hari setelah menerima keputusan Hakim Sidang.

Jumlah biaya pengacara yang wajar yang dapat diberikan berdasarkan tarif yang berlaku di masyarakat, tempat tindakan atau sidang dilakukan untuk kualitas layanan yang diberikan. Tidak ada bonus atau kelipatan yang digunakan dalam menghitung biaya yang diberikan.

Biaya kehadiran pengacara orang tua anak pada pertemuan PPP tidak akan diganti kecuali jika pertemuan diadakan berdasarkan perintah Hakim Sidang atau perintah pengadilan. Biaya pengacara tidak akan diganti untuk kehadirannya pada sesi penyelesaian atau mediasi.

Orang tua tidak berhak atas penggantian biaya pengacara dan biaya terkait yang diperoleh setelah distrik sekolah membuat tawaran tertulis untuk menyelesaikan masalah.

Biaya pengacara orang tua anak akan memenuhi syarat untuk dipertimbangkan penggantian jika:

- tawaran tertulis dibuat oleh distrik sekolah lebih dari 10 hari kalender sebelum dimulainya sidang;
- tawaran tertulis tidak diterima oleh orang tua dalam waktu 10 hari kalender; dan
- bantuan yang akhirnya diberikan kepada orang tua tidak lebih dari tawaran sebelumnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pengadilan dapat memerintahkan penggantian biaya pengacara Anda jika diketahui bahwa orang tua telah berhasil di sidang atau banding dan memiliki alasan bagus untuk tidak menerima tawaran distrik sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pengadilan dapat mengurangi jumlah penggantian biaya pengacara orang tua anak jika ditemukan bahwa:

- Anda atau pengacara Anda, selama sidang atau banding, menunda penyelesaian akhir perselisihan secara tidak wajar;
- jumlah biaya pengacara lebih besar daripada tarif per jam pengacara di masyarakat yang menyediakan layanan yang sama dan memiliki keterampilan, reputasi, dan pengalaman yang sama;
- layanan hukum dan waktu yang dihabiskan melampaui batas berdasarkan jenis sidang, banding, dan masalah yang dibahas; atau
- pengacara orang tua anak tidak memberi informasi BPD yang tepat dalam pemberitahuan permintaan due process yang wajar.

Namun, pengadilan mungkin tidak mengurangi biaya jika pengadilan mengetahui bahwa Negara Bagian atau distrik sekolah menunda tindakan penyelesaian akhir atau proses pengadilan secara tidak wajar, atau terdapat pelanggaran berdasarkan ketentuan prosedur perlindungan IDEA 2004.

Biaya pengacara yang wajar dapat diberikan kepada Badan Pendidikan Negara Bagian atau distrik sekolah:

- untuk pengacara orang tua anak jika proses pengaduan yang diajukan atau penyebab tindakan selanjutnya tidak jelas, tidak masuk akal, atau tanpa dasar; atau
- untuk pengacara orang tua yang lanjut mengajukan tuntutan setelah penyebab tuntutan menjadi tidak jelas, tidak masuk akal, atau tanpa dasar; atau
- untuk pengacara **atau orang tua**, jika keluhan orang tua pada proses pengadilan atau penyebab tindakan selanjutnya diajukan untuk tujuan yang tidak benar, seperti melecehkan, atau menyebabkan penundaan yang tidak penting, atau untuk menaikkan biaya proses pengadilan yang tidak perlu.

Prosedur Mengatur Anak penyandang Disabilitas

Peraturan New Hampshire tentang Pendidikan Anak penyandang Disabilitas ~ Ed 1124

Pemindahan yang berarti Perubahan Penempatan Pemindahan siswa karena masalah disiplin, **jika**

- Pemindahannya selama lebih dari 10 hari sekolah berturut-turut atau
- Ada serangkaian pemindahan karena jumlah pemindahan total lebih dari 10 hari sekolah, karena perilaku anak pada dasarnya sama dengan perilaku anak pada insiden sebelumnya yang mengakibatkan serangkaian pemindahan; dan karena faktor tambahan seperti lamanya masing-masing pemindahan, jumlah total waktu pemindahan anak, dan dekatnya durasi pemindahan satu dengan lainnya.

Jika hal ini terjadi, Anda harus menerima salinan pemberitahuan prosedur perlindungan. Rapat Tim PPP kemudian harus diadakan, dalam sepuluh hari setelah keputusan, untuk memindahkan anak Anda karena beberapa perubahan penempatan, dan Tim PPP *harus* memastikan bahwa perilakunya merupakan “manifestasi” dari ketidaksempurnaan (disabilitas) anak Anda. Penentuan apakah perilaku anak Anda berhubungan dengan disabilitasnya atau tidak merupakan keputusan Tim PPP. Untuk memutuskan, Tim PPP harus melihat dua kemungkinan:

1. Tindakan (perilaku) “disebabkan oleh, atau memiliki hubungan langsung dan kuat, dengan disabilitas anak Anda” atau
2. Tindakan (perilaku) yang dimaksud “adalah akibat langsung dari kegagalan distrik sekolah untuk menerapkan PPP.”

Jika Tim PPP menentukan bahwa perilaku tersebut **merupakan** manifestasi disabilitas anak Anda, **maka** Tim PPP harus melakukan salah satu dari hal berikut:

- melakukan asesmen perilaku fungsional (APF) kecuali jika distrik sekolah sudah melakukan APF dan membuat skema intervensi perilaku; atau
- mengkaji skema intervensi perilaku yang telah dibuat dan mengubah sesuai kebutuhan untuk mengatasi perilaku tersebut.
- mengembalikan anak ke penempatan asal, kecuali orang tua dan BPD menyetujui perubahan penempatan sebagai bagian dari perubahan skema intervensi perilaku, dan jika pemindahan disebabkan oleh “situasi khusus”.

Penentuan Manifestasi Jika anak Anda diberi hukuman penangguhan (*skorsing*) berupa perubahan penempatan, segera setelah keputusan dibuat, Anda harus diberi pemberitahuan berdasarkan prosedur perlindungan. Segera, tapi selambat-lambatnya 10 hari sekolah setelah keputusan dibuat, Tim PPP dan para ahli lain yang berpengalaman, seperti psikolog sekolah, harus mengadakan rapat untuk menentukan manifestasi. Jika belum selesai, maka juga akan dilakukan APF dan dibuat skema intervensi perilaku. Hal ini dapat dilakukan pada rapat yang sama dengan penentuan manifestasi.

Rapat penentuan manifestasi pasti diadakan kecuali jika perilaku terlibat dalam “situasi khusus” berikut. Anak ini:

- membawa senjata ke, atau memiliki senjata di, sekolah, lokasi sekolah, atau fungsi sekolah;
- dengan sengaja memiliki atau menggunakan obat-obatan terlarang, menjual atau meminta penjualan zat yang dikendalikan, di sekolah; ATAU
- telah menyebabkan cedera parah pada orang lain saat berada di sekolah, di lokasi sekolah, atau di fungsi sekolah.

Pemindahan ke Tempat Pendidikan Alternatif Sementara (TPAS) Dalam “kondisi khusus,” (ingat bahwa IDEA 2004 mengizinkan pendekatan “kasus per kasus” terhadap masalah disiplin), petugas sekolah dapat memindahkan siswa ke SPAS selama tidak lebih dari 45 hari sekolah “terlepas apakah perilaku tersebut merupakan manifestasi disabilitas anak atau tidak, jika anak tersebut:

- membawa senjata ke, atau memiliki senjata, di sekolah atau di fungsi sekolah;
- dengan sengaja memiliki atau menggunakan obat-obatan terlarang, atau menjual atau menggunakan zat yang dikendalikan di sekolah atau di fungsi sekolah; ATAU
- “telah menyebabkan cedera badan parah pada orang lain saat berada di sekolah, di lokasi sekolah, atau di fungsi sekolah.”

Selain itu, Hakim Sidang dapat menempatkan seorang siswa, karena siswa tersebut menimbulkan bahaya besar bagi dirinya atau orang lain dalam penempatan siswa saat ini, dalam SPAS selama **45 hari sekolah** dengan melakukan proses percepatan sidang yang wajar.

SPAS ditentukan oleh Tim PPP, terlepas dari siapa yang memutuskan untuk memindahkan anak tersebut. SPAS harus mengizinkan anak tersebut untuk melanjutkan kurikulum umum dan tujuan dalam PPP anak, meskipun di tempat lain. Layanan yang dirancang untuk mencegah perilaku berulang juga harus disediakan.

Selama penempatan anak di SPAS, Tim PPP harus (jika belum ada yang melakukannya) melakukan APF dan membuat skema intervensi perilaku positif. Rapat penentuan manifestasi juga perlu dilakukan. Saat siswa berada di SPAS, Tim PPP dapat:

- memindahkan siswa dari penempatan saat ini;
- mempertimbangkan kesesuaian PPP saat ini dan mengusulkan perubahan jika sesuai; dan
- mempertimbangkan kesesuaian penempatan ketika insiden terjadi dan mengusulkan perubahan, jika sesuai.

Definisi: Zat yang dikendalikan adalah obat atau zat lain yang tergolong dalam Jadwal I, II, III, IV atau V dalam pasal 202(c) tentang Undang-Undang Zat yang dikendalikan (21 USC 812(c)).

Obat Terlarang adalah zat yang dikendalikan, tetapi tidak termasuk zat yang dimiliki secara sah atau digunakan di bawah otoritas lain berdasarkan Undang-undang tersebut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Federal lain.

Senjata memiliki arti sesuai dengan istilah “senjata berbahaya” berdasarkan ayat (2) dari subpasal pertama (g) dari pasal 94\30 dari bab 18, USC.

Cedera parah memiliki arti sesuai dengan istilah berdasarkan ayat (3) subpasal (h) pasal 1365 dari bab 18, USC.

Hak Mengajukan Banding Anda atau distrik sekolah dapat mengajukan banding atas keputusan mengenai penentuan manifestasi atau penempatan dalam lingkungan pendidikan alternatif sementara dengan meminta sidang due process. Anda atau distrik sekolah dapat meminta “percepatan sidang” untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin.

Percepatan Sidang Due Process untuk Masalah Terkait Disiplin Saat masalah hukuman terlibat, percepatan sidang due process:

- harus dilakukan oleh hakim sidang yang memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk Hakim Sidang oleh Departemen Pendidikan;
- harus diadakan dalam waktu 20 hari sekolah, dan mencapai keputusan dalam waktu 10 hari sekolah;
- dapat diajukan banding, sama halnya dengan keputusan proses sidang lain, sebagaimana dijelaskan oleh NH
- Departemen Pendidikan. Selama proses banding, anak yang ditempatkan di SPAS tetap berada di tempat tersebut, sampai Hakim Sidang membuat keputusannya atau sampai masa sekolah 45 hari berakhir. Penempatan ini akan dianggap sebagai penempatan “tetap” anak selama periode ini.

Jika distrik sekolah masih merasa bahwa anak tersebut menjadi ancaman terhadap keselamatan orang lain, distrik sekolah dapat meminta agar anak tersebut tetap berada di penempatan “sementara”, atau ditempatkan di tempat lain sebagaimana diusulkan oleh Tim PPP. Anak tersebut akan kembali ke penempatan awal selama sidang kecuali jika distrik sekolah percaya bahwa kembalinya anak tersebut tidak akan menjadi ancaman bagi keselamatan anak tersebut atau orang lain. Dalam hal ini, distrik sekolah dapat meminta percepatan sidang. Proses ini dapat diulang jika perlu. Jika terjadi ketidaksepakatan mengenai memindahkan anak penyandang disabilitas ke SPAS atau penempatan lain yang dipilih oleh Hakim Sidang, Hakim Sidang harus mengikuti persyaratan yang sama dengan yang akan dia gunakan untuk membuat penempatan di SPAS.

Jika distrik sekolah menghukum anak penyandang disabilitas, dengan prosedur yang berlaku untuk semua anak, maka distrik sekolah harus mengirim data pendidikan dan hukuman khusus kepada petugas atau para petugas yang membuat keputusan akhir tentang hukuman tersebut.

Siswa yang belum memenuhi syarat untuk Pendidikan Khusus Khusus bagi siswa yang belum diidentifikasi, tetapi terlibat dalam proses penghukuman, perlindungan yang dijelaskan di bagian ini berlaku hanya jika distrik sekolah mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak penyandang disabilitas karena:

- orang tua telah menyatakan keprihatinannya secara tertulis kepada petugas sekolah bahwa anak mereka memerlukan pendidikan khusus dan layanan terkait;
- orang tua dari anak tersebut telah meminta evaluasi terhadap anak mereka;
- guru (atau petugas distrik sekolah lain) telah menyatakan keprihatinan tentang pola perilaku atau tindakan anak tersebut kepada direktur pendidikan khusus atau petugas pengawas lain sesuai dengan sistem *Child Find* atau rujukan sekolah di distrik tersebut.

Evaluasi Selama Proses Hukuman Jika Anda meminta evaluasi untuk anak Anda selama proses penghukuman, evaluasi harus dilakukan sesegera mungkin (dipercepat), DAN anak Anda akan tetap berada di penempatan pendidikan yang telah ditentukan oleh otoritas pendidikan selama periode penangguhan awal, yang dapat penangguhan atau pengeluaran paksa tanpa layanan pendidikan. Jika anak Anda diketahui sebagai anak penyandang disabilitas, distrik sekolah harus memberikan pendidikan khusus dan layanan terkait, termasuk selama periode banding dan/atau penempatan ke Tempat Pendidikan Alternatif Sementara (TPAS).

Rujukan dan Tindakan oleh Penegakan Hukum dan Otoritas Peradilan IDEA 2004 tidak melarang lembaga untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas kepada pihak berwenang atau mencegah penegakan hukum dan otoritas peradilan Negara Bagian melakukan tanggung jawab mereka terhadap penerapan undang-undang Negara Bagian dan Federal

Undang-undang Pembatasan

Undang-undang negara bagian menetapkan batas waktu tertentu, yang disebut “undang-undang pembatasan,” pada tindakan yang melibatkan sidang due process, mengajukan banding ke pengadilan negara bagian dan federal, dan penggantian biaya pengacara dan uang sekolah yang telah Anda bayarkan untuk penempatan sepihak.

Jika orang tua atau distrik sekolah tidak mematuhi batas waktu, mereka bisa kehilangan haknya atas sidang due process atau banding atas putusan Hakim Sidang ke pengadilan.

Berikut ini adalah daftar batasan waktu yang penting:

- orang tua harus meminta sidang due process dalam waktu 2 tahun sejak tanggal tuduhan pelanggaran ditemukan atau seharusnya ditemukan;
- orang tua harus meminta sidang due process dalam waktu 90 hari sejak penempatan sepihak untuk mendapatkan kembali biayanya;
- orang tua harus mengajukan tindakan untuk mengembalikan biaya pengacara dan biaya pengadilan yang sewajarnya di pengadilan tinggi negara bagian atau pengadilan federal dalam waktu 120 hari sejak diterimanya keputusan akhir *Hakim Sidang*. Semua keputusan harus dikirim oleh *Departemen Pendidikan kepada kedua pihak*, yang berupa surat bersertifikat, dan tanda terima pengembalian yang diminta.

Persyaratan Penempatan Sepihak oleh Orang Tua Anak di Sekolah Swasta dengan Biaya Publik

Peraturan New Hampshire tentang Pendidikan Anak penyandang Disabilitas ~ Ed 1112

Jika distrik sekolah membuat pendidikan publik yang gratis dan sesuai (PPGS) untuk anak Anda dan Anda memilih untuk menempatkan anak Anda di sekolah swasta maka distrik sekolah tidak wajib membayar biaya pendidikan, termasuk pendidikan khusus dan layanan terkait. Namun, distrik sekolah tempat sekolah swasta berada harus memasukkan anak Anda ke dalam populasi siswa yang kebutuhannya dipenuhi berdasarkan ketentuan IDEA 2004 tentang anak-anak yang telah ditempatkan oleh orang tua mereka di sekolah swasta. Anak-anak ini tidak memiliki hak individu atas pendidikan khusus dengan biaya distrik sekolah. Berdasarkan IDEA 2004, tanggung jawab untuk menentukan layanan yang layak dimiliki oleh distrik sekolah swasta, dan bukan distrik sekolah tempat Anda dan anak Anda berada.

Beberapa prosedur tentang hal ini untuk distrik sekolah umum sekarang diwajibkan oleh undang-undang federal. IDEA 2004 mewajibkan distrik sekolah, yang memiliki sekolah swasta dalam batas geografisnya untuk berkonsultasi dengan petugas sekolah swasta tersebut dan perwakilan orang tua dari anak-anak dengan yang bersekolah di sekolah swasta tersebut. Berdasarkan konsultasi penting ini, distrik sekolah tempat sekolah swasta berada, harus membuat rencana tentang bagaimana cara menggunakan dana IDEA 2004 yang dialokasikan untuk kelompok anak-anak ini, yang berarti bahwa satu, beberapa, atau semua siswa yang ditempatkan oleh orang tua mereka dapat menerima beberapa layanan pendidikan khusus yang layak saat masuk sekolah swasta. Layanan layak yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas yang ditempatkan oleh orang tua mereka di sekolah swasta, yang telah ditunjuk oleh distrik untuk menerimanya, harus dijelaskan dalam Skema Layanan (SL).

Siswa masih akan berhak atas PPGS dalam LPTM yang sesuai dengan persyaratan IDEA 2004, dan dapat masuk ke sistem publik di distrik sekolah tempat tinggal anak setiap saat dan kemudian berhak mendapatkan layanan penuh dengan PPP melalui distrik sekolah tempat tinggal.

Penempatan apabila PPGS Bermasalah Jika Anda tidak percaya bahwa distrik sekolah tempat Anda dan anak Anda tinggal menyediakan PPGS bagi anak Anda, Anda dapat mengajukan sidang due process untuk meminta agar distrik sekolah (distrik sekolah tempat tinggal) membayar program tersebut. Pilihan ini hanya tersedia bagi orang tua dari anak yang sebelumnya menerima pendidikan khusus dan layanan terkait **melalui** sekolah umum tempat mereka tinggal (meskipun penempatan tersebut merupakan program pribadi yang dipilih oleh Tim). Jika Hakim Sidang atau pengadilan mengetahui bahwa distrik sekolah tempat anak tersebut tinggal tidak menyediakan PPGS bagi anak secara tepat waktu sebelum pendaftaran anak di program pribadi, Hakim Sidang atau pengadilan mungkin meminta distrik sekolah untuk mengganti semua atau sebagian biaya pendaftaran tersebut.

Menurut Hakim Sidang atau pengadilan, penempatan orang tua mungkin tepat meskipun tidak sesuai dengan standar Negara Bagian yang berlaku untuk pendidikan yang diberikan oleh badan pendidikan negara bagian atau lokal.

Batasan Penggantian Biaya Penggantian biaya penempatan orang tua “sepihak” ini dapat dikurangi atau ditolak jika:

- pada pertemuan Tim PPP terbaru di distrik sekolah tempat tinggal Anda sebelum memindahkan anak Anda dari penempatan di sekolah umum, Anda tidak memberi tahu Tim PPP bahwa Anda menolak penempatan yang diajukan oleh badan publik untuk menyediakan PPGS kepada Anak Anda, termasuk menyatakan keinginan dan niat Anda untuk mendaftarkan anak Anda di sekolah swasta dengan biaya publik; atau paling tidak 10 hari kerja (termasuk hari libur yang terjadi pada hari kerja) sebelum pemindahan anak Anda dari penempatan di sekolah umum, Anda tidak memberi tahu secara tertulis niat Anda untuk memindahkan anak Anda;
- sebelum memindahkan anak Anda dari penempatan sekolah umum, distrik sekolah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Anda tentang niat untuk mengevaluasi anak Anda, tetapi Anda tidak mengizinkan anak Anda dievaluasi; atau
- atas keputusan pengadilan bahwa tindakan Anda tidak masuk akal.

Namun, biaya penggantian tidak dapat dikurangi atau ditolak karena tidak memberikan pemberitahuan jika:

- sekolah mencegah agar Anda tidak memberi pemberitahuan;
- Anda belum menerima pemberitahuan tentang persyaratan pemberitahuan ini; atau
- memenuhi persyaratan pemberitahuan mungkin akan menyebabkan cedera fisik pada anak; dan mungkin, atas pertimbangan pengadilan hakim sidang, tidak dikurangi atau ditolak karena Anda tidak memberikan pemberitahuan yang dipersyaratkan;
- Anda buta huruf dan tidak bisa menulis dalam Bahasa Inggris; dan/atau
- memenuhi persyaratan pemberitahuan kemungkinan akan mengakibatkan luka emosional serius bagi anak.

Dalam kasus penempatan sepihak, ketika distrik sekolah tidak diberi kesempatan yang wajar untuk mengevaluasi anak tersebut dan mengembangkan PPP, Anda tidak boleh meminta penggantian biaya sampai distrik sekolah diberi kesempatan untuk mengevaluasi anak tersebut dan mengembangkan PPP.

Bantuan/Narasumber Gratis atau Murah

Ada layanan gratis dan murah yang tersedia untuk membantu Anda memahami dan mendapatkan hak berdasarkan pendidikan khusus dan proses pendidikan khusus. Berikut adalah beberapa badan yang dapat memberi bantuan ini.

Direktur Pendidikan Khusus untuk Distrik Sekolah

(Distrik sekolah harus menyimpan daftar sumber daya hukum gratis atau murah, yang mungkin termasuk narasumber lokal)

Bureau of Special Education (Biro Pendidikan Khusus)
New Hampshire Department of Education (Departemen Pendidikan New Hampshire) 101
Pleasant Street
Concord, New Hampshire 03301-3860
Telepon: (603) 271-3741
Faks: (603) 271-1099
Email: Barbara.Raymond@doe.nh.gov

Disabilities Right Center, Inc.
P.O. Box 3660
Concord, New Hampshire 03301
Telepon: (603) 228-0432 atau 1-800-834-1721
Faks: (603) 225-2077
Email: advocacy@drcnh.org

New Hampshire Bar Association/Pro Bono
112 Pleasant Street
Concord, New Hampshire 03301
Telepon: (603) 224-6942 atau 1-800-852-3799
(Masuk melalui Disabilities Rights Center)

Parent Information Center (PIC) (Pusat Informasi Orang Tua (PIOT))
54 Old Suncook Road
Concord, New Hampshire 03301
(603) 224-7005 atau 1-800-947-7005
Faks: (603) 224-4365
Situs Web (terhubung ke e-mail staf): www.parentinformationcenter.org
Pusat Informasi Orang Tua menawarkan buklet gratis berjudul "Langkah-langkah dalam Proses Pendidikan Khusus" yang memberikan informasi tentang proses dan undang-undang pendidikan khusus.

Catatan: Informasi tambahan dapat diperoleh dengan menghubungi distrik sekolah lokal Anda, Departemen Pendidikan NH di (603) 271-3741 atau di situs web Departemen Pendidikan NH: http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/index.htm

Definisi dan Jenis-jenis “Hari”

Jenis-jenis Hari yang Digunakan dalam Peraturan New Hampshire tentang Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas

“Hari” diartikan dalam Bagian 300.9 dari IDEA sebagai:

- (a) **Hari** adalah hari kalender kecuali dinyatakan lain sebagai hari kerja atau hari sekolah;
- (b) **Hari kerja** adalah Senin sampai Jumat, kecuali untuk hari libur Federal dan Negara Bagian (kecuali hari libur yang secara khusus termasuk dalam penetapan hari kerja, seperti dalam Bagian 300.403(d)(1)(ii); dan
- (c) (1) **Hari sekolah** adalah semua hari, termasuk setengah hari di mana anak hadir ke sekolah untuk tujuan belajar.

HARI (HARI KALENDER)	
HARI	
60	Evaluasi selesai – Ed 1107.01(c)-(d)
30	Diadakan rapat untuk mengembangkan PPP awal dalam waktu 30 hari sejak penentuan kelayakan – 34 PPF 300.323(c) (1)-(2)
10	Pemberitahuan tertulis mengenai rapat Tim PPP yang diberikan oleh BPD kepada orang tua – Ed 1103.02(a)
5	Pemberitahuan tertulis mengenai rapat yang diberikan oleh BPD kepada orang tua – Ed 1103.02(a)
10	Sebelum hari ke 46 – BPD menyerahkan dokumentasi kepada Direktur Pendidikan Khusus untuk mendukung kelanjutan pendidikan di rumah – petunjuk – Ed 1111.05(h)
45	Lama perubahan penempatan ke SPAS oleh BPD karena obat-obatan dan senjata – Ed 1124.01
45	Lama perubahan penempatan ke SPAS oleh sidang karena alasan keselamatan – Ed 1124.01
45	Keputusan akan dikirimkan kepada para pihak dalam waktu 45 hari sejak sidang singkat – Ed 1123.25
30	Penentuan oleh BPD atas perlunya wali dalam waktu 30 hari sejak menerima rujukan – Ed 1115.03(g)
	Penghentian penunjukan orang tua wali setelah investigasi oleh Komisaris Pendidikan – Ed 1115.05(d)
30	Pemberitahuan tertulis oleh Depen kepada BPD dan orang tua wali untuk mengakhiri hubungan orang tua wali – Ed 1115.05(d)
55	Jika orang tua ditunjuk sebagai wali, keputusan akan dibuat dalam waktu 55 hari – Ed 1115.09(b)(2)
14	Batas jumlah hari bagi orang tua untuk menjawab permohonan izin sejak tanggal pengiriman PAS oleh BPD – Ed 1120.03(a)
14	Batas jumlah hari bagi orang tua untuk menolak mengizinkan sejak tanggal penerimaan PAS dari BPD – Ed 1120.04(c)
14	Batas jumlah hari bagi BPD untuk dapat menerapkan perubahan yang diusulkan jika orang tua tidak menjawab permohonan izin – Ed 1120.06(a)
60	Batas waktu resolusi keluhan – Ed 1121.02(e)
95	Resolusi keluhan apabila diperlukan pertimbangan ulang – Ed 1121.04
20	Meminta pertimbangan ulang Komisaris mengenai temuan keluhan dalam waktu 10 hari – Ed 1121.04(a)
15	Komisaris menyelesaikan pertimbangan ulang keluhan – Ed 1121.04(b)
5	Pemberitahuan pihak yang akan hadir ke mediasi – RSA 186-C:24 I(b)
30	Mediasi dilakukan dalam waktu 30 hari sejak permohonan – RSA 186-C:24 II(b)
10	Sebelum pihak mediasi menyerahkan ringkasan aspek yang signifikan dalam kasus mereka – ED 205.03(h)
30	Mediator melapor kepada kantor perundang-undangan dan sidang mengenai status mediasi dalam waktu 30 hari sejak sesi pengobatan awal – ED 205.03(m)
5	Sebelum pihak mediasi konferensi netral menyerahkan ringkasan aspek yang signifikan dalam kasus mereka – RSA 186:C:23-b II(a)

120	Pengajuan banding Sidang Due Process dilakukan dalam waktu 120 hari – RSA 186-C:16-b IV – V
5	Pernyataan yang diajukan tentang fakta pertukaran oleh semua pihak sebelum Sidang Due Process – Ed 1123.15(b)
30	Penerapan penuh keputusan sidang Due Process dalam waktu 30 hari – Ed 1123.22(a)
90	Laporan tertulis ke Kantor Perundang-undangan dan Sidang yang menjelaskan penerapan keputusan petugas sidang – Ed 1123.22(b)
20	Hari pertama sidang singkat jatuh dalam waktu 14 hari sejak permohonan – Ed 1123.25(c)(2)
20	BPD bertanggung jawab untuk menuliskan informasi ke SIPKNH dalam waktu 20 hari sejak memasukkan tindakan yang harus dilakukan – Ed 1126.07
HARI SEKOLAH	
10	Tidak ada layanan pada hari pertama dari 10 hari pemindahan karena hukuman (Apabila tidak memberikan layanan untuk siswa tanpa disabilitas) – Ed 1124.01
10	Jumlah hari berturut-turut pemindahan karena hukuman = perubahan penempatan – Ed 1124.01 – Ed 1124.02
180	Hari dalam tahun sekolah = Tahun Sekolah – RSA 189:1
10+	Jumlah total hari pemindahan karena hukuman – Ed 1124.01
10	Jumlah hari sejak keputusan untuk mengubah penempatan dalam waktu 10 hari sekolah di mana distrik harus melakukan kajian penetapan manifestasi – Ed 1124.01 (34 PPF 300.530(e))
45	Jumlah hari keputusan dicapai dan disampaikan kepada pihak DPH (Ketidakhadiran dan perpanjangan dikabulkan) – Ed 1123.18(e)
Jumlah hari yang ditetapkan	Selama diskors/dikeluarkan lebih dari 10 hari – PPGS diberikan – Ed 1123.01 – Ed 1123.02
HARI KERJA	
10	Pemberitahuan sebelumnya mengenai penghentian anak ke sekolah swasta dengan biaya publik (termasuk hari libur yang jatuh pada hari kerja) – Ed 112.02 (34 PPF 2000.148(d)(l)(iii))
2	Sidang singkat – Membatasi pengenalan bukti baru dalam kasus DPDP yang tidak diungkapkan ke pihak lain – Ed 1123.25(g)
2	Pertukaran bukti sebelum hari pertama dalam DPDP singkat – Ed 1123.25(g)
5	Pertukaran bukti sebelum hari pertama dalam DPDP biasa – Ed 1123.15(b)
5	Membatasi pengenalan bukti baru dalam kasus DPDP yang tidak diungkapkan ke pihak lain – Ed 1123.17(c)
10	Paling lambat 10 hari setelah pemindahan karena hukuman menurut rapat Tim PPP penempatan – Ed 1124.
5	Menandai pernyataan yang diusulkan mengenai fakta sebelum hari pertama sidang DPB (Due Process Banding) – Ed 1123.15(b)
15	Rapat penempatan rujukan dilaksanakan setelah menerima rujukan – Ed 1106.01(d)-(e)

Singkatan

Berikut ini adalah daftar singkatan umum yang digunakan sehubungan dengan proses pendidikan khusus dan hukum/hak pendidikan khusus. Tidak semua singkatan pada daftar berikut ada di dalam buklet ini. Daftar ini bukan daftar lengkap, hanya sebuah alat untuk membantu Anda lebih memahami materi pendidikan khusus.

<u>Akronim</u>	<u>Topik</u>
APT	Analisis Perilaku Terapan
UPAD	Undang-undang Penduduk AS dengan Disabilitas
ADD/ADHD	Attention Deficit Disorder/ Hyperactivity Disorder (Gangguan Memusatkan Perhatian / Hiperaktivitas)
PFT	Pendidikan Fisik Teradaptasi
ASL	American Sign Language (Bahasa Isyarat Amerika)
T(L)P	Teknologi (Layanan) Pendukung
CAPD	Central Auditory Processing Disorder (Gangguan Proses Pendengaran)
AKDP	Advokasi Khusus yang Ditunjuk Pengadilan
DALB	Dewan Anak-Anak Luar Biasa
CF	Cystic Fibrosis (Fibrosis Kistik)
PPF	Pedoman Peraturan Federal
LABK	Layanan Anak-anak Berkebutuhan Khusus
PKMK	Pusat Kesehatan Mental Komunitas
CP	Cerebral Palsy (Kelumpuhan Otak)
KP/GP	Keterlambatan Perkembangan (lahir sampai 9 tahun)/Gangguan Perkembangan
DGP	Dewan Gangguan Perkembangan
DKLM	Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia
Depen	Departemen Pendidikan
PHPD	Disabilities Rights Center
DARK	Divisi Anak-anak, Remaja dan Keluarga
DS	Down syndrome
DP	Due Process (Proses Peradilan)
GE	Gangguan Emosional
ID	Intervensi Dini
JID	Jaringan Intervensi Dini
PBI	Pembelajar Bahasa Inggris
UUSSB	Undang-undang Setiap Siswa Berhasil
ESL	English as a Second Language (Bahasa Inggris sebagai Bahasa kedua)
TSD	Tahun Sekolah Diperpanjang
PPGS	Pendidikan Publik yang Gratis dan Sesuai
FAS	Fetal Alcohol Syndrome (Sindrom Janin Alkohol)
APF	Asesmen Perilaku Fungsional
BLDTK	Bantuan dan Layanan Dini Terpusat Keluarga
UUHPKK	Undang-undang Hak dan Privasi Kependidikan Keluarga
GP	Gangguan Pendengaran
GI	Gangguan Intelektual
IDEA 2004	Individuals with Disabilities Education Act 2004 (Undang-undang Pendidikan bagi Orang-orang dengan Disabilitas 2004)
EPI	Evaluasi Pendidikan Independen
PPP	Program Pendidikan Perorangan
SBKP	Skema Bantuan Keluarga Perorangan
KK	Kadar Kecerdasan
GP	Gangguan Pembelajaran
BPD	Badan Pendidikan Daerah

KBIT	Kemampuan Berbahasa Inggris Terbatas
LPTM	Lingkungan Paling Tidak Membatasi
MD	Muscular Dystrophy (Distrofi Otot)
NF	Neuro Fibrosis (Neurofibromatosis)
SIPKNH	Sistem Informasi Pendidikan Khusus New Hampshire
GPNV	Gangguan Pembelajaran Nonverbal
OCD	Obsessive Compulsive Disorder (Gangguan obsesif kompulsif)
KHS	Kantor Hak Sipil
ODD	Gangguan Pemberontakan Oposisi
GKL	Gangguan Kesehatan Lainnya
KPPK	Kantor Program Pendidikan Khusus
TK	Terapi Kerja
IBPP	Intervensi dan Bantuan Perilaku Positif
PDD	Pervasive Developmental Disorder (Gangguan Perkembangan Pervasive)
PDD/TS	Pervasive Developmental Disorder, Tidak Spesifik
PIOT	Pusat Informasi Orang Tua
PIPOT	Pusat Informasi dan Pelatihan Orang Tua
HP	Hukum Pidana
TF	Terapi Fisik
PTSD	Post-Traumatic Stress Disorder (Gangguan Stres Pasca-Trauma)
RAD	Reactive Attachment Disorder (Gangguan Terlalu Lekat)
RST	Revisi Statusa Teranotasi
BPNB	Badan Pendidikan Negara Bagian
KPNB	Komite Penasihat Negara Bagian
SAFI	Spesialis Asesmen Fungsi Intelektual
SAS	Satuan Administratif Sekolah
IS	Integrasi Sensorik
GPS	Gangguan Pembelajaran Spesifik
PB&B	Patologis Bicara & Bahasa
SB&B	Spesialis Bicara & Bahasa
SL	Skema Layanan
STr	Skor Terskala
SSt	Skor Standar
PJT	Penghasilan Jaminan Tambahan
PJSD	Penghasilan Jaminan Sosial Disabilitas
COT	Cedera Otak Traumatis
PTM	Perangkat Tele-mengetik
RK	Rehabilitasi Kejuruan
SKODW	Skala Kecerdasan Orang Dewasa Wechsler
SKAW	Skala Kecerdasan Anak-anak Wechsler
PAS	Pemberitahuan Awal Tertulis
SKAW-TK&SD	Skala Kecerdasan Wechsler untuk Anak TK dan SD
BPD	Badan Pendidikan Daerah/Local Education Agency (LEA)

LAMPIRAN A:

Pemberitahuan Tertulis tentang Penggunaan Dana Sosial atau Asuransi

PEMBERITAHUAN TERTULIS TENTANG PENGGUNAAN MANFAAT ATAU ASURANSI UMUM

Yth. Orang tua atau Wali,

Dengan pemberitahuan tertulis ini, kami menyampaikan hak dan perlindungan Anda berdasarkan undang-undang pendidikan khusus federal, IDEA (Undang-undang Pendidikan bagi Orang-orang Disabilitas), sehubungan dengan penggunaan dana sosial atau asuransi anak Anda. Di New Hampshire “dana sosial dan asuransi” disebut dengan Medicaid, yang disediakan melalui program Medicaid untuk Sekolah Negara Bagian, termasuk program Medicaid yang diberikan melalui organisasi kepedulian yang dikelola. Melalui Program Medicaid untuk sekolah, distrik sekolah NH di seluruh negara bagian menerima jutaan dolar setiap tahun dari Negara Bagian atau sumber dan setempat.

Dana IDEA membiayai sebagian pendidikan khusus dan layanan terkait untuk anak Anda. Dana dari program dana sosial atau asuransi, yang dikenal dengan nama Medicaid di NH, juga dapat digunakan oleh distrik sekolah untuk membantu biaya pendidikan khusus dan layanan terkait berdasarkan PPP anak Anda, tapi hanya jika Anda mengizinkannya. Distrik sekolah tidak akan mengakses manfaat Medicaid anak Anda jika Anda dipungut biaya, seperti pengurangan manfaat atau kenaikan pada premi Anda.

Distrik sekolah bertanggung jawab untuk memastikan agar anak Anda menerima semua layanan dalam PPP-nya, tanpa memandang apakah Anda mengizinkan distrik sekolah untuk menggunakan asuransi atau dana sosial Anda atau anak Anda. Apabila Anda tidak mengizinkan, atau mencabut izin Anda setelah memberikannya, layanan anak Anda tidak akan terpengaruh; semua layanan dalam PPP anak Anda akan terus diberikan. Anda juga tidak perlu mengajukan atau mendaftarkan Medicaid untuk anak Anda agar menerima layanan pendidikan khusus.

KAPAN PEMBERITAHUAN TERTULIS HARUS DIBERIKAN

Sebelum distrik sekolah meminta Anda untuk memberikan izin akses Medicaid anak Anda untuk pertama kalinya, distrik sekolah harus menyerahkan pemberitahuan hak dan perlindungan sebagai hak Anda menurut IDEA.

- IDEA mewajibkan penyerahan pemberitahuan ini kepada Anda sebelum distrik sekolah menggunakan Medicaid anak Anda untuk pertama kalinya,
- Sebelum distrik sekolah menerima izin Anda untuk menggunakan manfaat tersebut untuk pertama kali; dan
- Setiap tahun setelahnya.

Pemberitahuan tertulis ini harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum dan bahasa ibu Anda atau sarana komunikasi lain yang Anda gunakan, kecuali memang tidak memungkinkan.

PERSETUJUAN ORANGTUA

Sebelum distrik sekolah dapat menggunakan manfaat atau asuransi umum Anda atau anak Anda untuk pertama kalinya guna membiayai pendidikan khusus dan layanan terkait sesuai IDEA, distrik sekolah harus memperoleh izin Anda yang tertanggal dan ditandatangani. Distrik sekolah akan memberikan formulir izin yang perlu Anda buhhi tanggal dan tanda tangan. Distrik sekolah hanya perlu mendapatkan izin Anda *satu* kali.

Persyaratan izin memiliki dua bagian:

1.) Izin penyingkapan informasi pribadi anak Anda kepada agen negara bagian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Medicaid.

- Untuk mengakses Medicaid anak Anda, informasi pribadi tertentu yang dapat dilacak akan diungkapkan untuk tujuan penagihan oleh distrik sekolah kepada agen Medicaid Negara Bagian atau agen penagihan Medicaid. Menurut hukum federal, izin tertulis Anda diperlukan sebelum distrik sekolah dapat mengungkap informasi pribadi (seperti nama anak, alamat, nomor siswa, PPP, atau hasil evaluasi) dari data pendidikan anak Anda kepada pihak selain distrik sekolah Anda, dengan beberapa pengecualian. Izin awal Anda, untuk penggunaan Medicaid anak Anda, dapat digunakan distrik sekolah Anda untuk mengungkapkan informasi pribadi yang dapat dilacak, yang diperlukan untuk penggantian dana Medicaid, kepada badan Medicaid Negara Bagian atau badan penagihan Medicaid.

2.) Pernyataan untuk mengakses Medicaid anak Anda:

- Izin Anda yang mengizinkan distrik sekolah untuk menggunakan Medicaid anak Anda tidak akan dipungut biaya apa pun, dan tidak akan berdampak negatif pada layanan medis yang mungkin diterima anak Anda melalui sistem Medicaid. Terdapat beberapa perlindungan spesifik sehubungan dengan penggunaan Medicaid:
 - Distrik sekolah harus memperoleh persetujuan orang tua sebelum dapat menggunakan Medicaid anak Anda untuk pertama kali.
 - Distrik sekolah Anda tidak dapat mengakses (menggunakan) Medicaid anak Anda apabila penggunaan tersebut dapat:
 - Mengurangi cakupan masa berlaku yang tersedia atau manfaat Medicaid lainnya untuk anak Anda;
 - Menyebabkan tagihan biaya pada keluarga untuk layanan kebutuhan medis (baik yang diberikan di sekolah atau tempat lain) yang seharusnya ditanggung oleh Medicaid anak Anda.
 - Menaikkan premi (jika berlaku) atau menyebabkan penghentian manfaat atau asuransi; atau
 - Berisiko menghapus kelayakan untuk penghapusan berbasis rumah dan masyarakat, berdasarkan total pengeluaran terkait kesehatan.

- **PENCABUTAN IZIN**

- Jika Anda memberikan izin kepada distrik sekolah untuk mengungkap informasi pribadi anak Anda kepada agen Negara Bagian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Medicaid anak Anda, menurut hukum federal, Anda berhak untuk mencabut izin tersebut kapansaja.
- Jika Anda tidak ingin distrik sekolah melanjutkan pembiayaan program dana social atau asuransi umum Anda atau anak Anda untuk pendidikan khusus dan layanan terkait sesuai dengan IDEA, Anda harus mencabut izin yang mengizinkan distrik sekolah mengakses manfaat Medicaid anak Anda. Dengan mencabut izin, Anda menghentikan wewenang distrik sekolah untuk mengakses program dana social atau asuransi umum Negara Bagian anak tersebut. Pencabutan izin ini berlaku setelah distrik sekolah menerima pencabutan dengan tanda tangan Anda.

Lengkapi bagian berikut ini HANYA jika orang tua/wali mencabut izin akses Medicaid anak.

PENCABUTAN IZIN

Nama Siswa: _____ Tanggal Lahir ____/____/____

Nomor ID Medicaid _____

Sebagai orang tua/wali siswa tersebut di atas, saya mencabut izin distrik sekolah untuk mengakses Medicaid anak tersebut. Saya paham bahwa hal ini berarti distrik sekolah tidak akan lagi dapat menggunakan Medicaid anak saya untuk membantu membiayai pendidikan khusus dan layanan terkait anak saya. Pencabutan izin ini berlaku setelah distrik sekolah menerima formulir *Pencabutan Izin* dengan tanda tangan orang tua/wali.

Tanda Tangan Orang tua

Tanggal Hari Ini

Asli untuk file siswa-----salinan untuk orang tua/wali